



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

ANALISIS *SUSTAINABILITY REPORTING* ASIA PULP AND PAPER

DIAJUKAN OLEH :

JULEORIA NAINGGOLAN
0606148885

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2008**





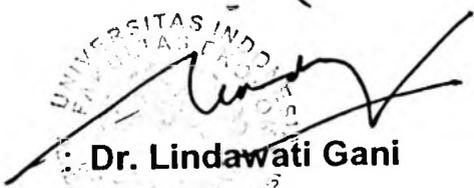
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : **Juleoria Nainggolan**
Nomor Mahasiswa : **0606148885**
Konsentrasi : **Atestasi dan Pelaporan Keuangan**
Judul Karya Akhir : **Analisis *Sustainability Reporting* Asia Pulp and Paper**

Tanggal : **29 AUG 2008**

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi


: **Dr. Lindawati Gani**

Tanggal : **29 AUG 2008**


Pembimbing Karya Akhir : **Prof. Dr. Sukrisno Agoes**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tanggung jawab sosial perusahaan sangat berkaitan dengan pelaporan publik (*public reporting*). Saat ini, dorongan akan akuntabilitas perusahaan yang lebih besar seiring dengan permintaan untuk transparansi yang lebih tinggi, ditanggapi oleh beberapa perusahaan dengan mengeluarkan laporan yang memasukkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang mereka lakukan. Pengungkapan (*disclosure*) merupakan tema dari sistem regulasi perusahaan modern dan melibatkan ketentuan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik dalam berbagai cara.

Berkaitan dengan pengungkapan ini, pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa perusahaan harus melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan (materi non-keuangan)? Hal apa yang mendorong bisnis melaporkan hal ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan membangun basis untuk berbagi informasi dengan *stakeholder* dimasa mendatang.

Dijalankannya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social reporting*) adalah indikasi dari satu kenyataan bahwa pertanyaan lama "apakah ini baik bagi pemegang saham?" yang dahulu menjadi satu-satunya motif perusahaan dalam melakukan suatu aktivitas kini tidak lagi dapat terjawab secara terpisah dari pertimbangan atas relevansi isu-isu khusus yang berkaitan dengan *stakeholder* yang lebih luas.

Hal ini berarti, pemikiran "*single bottom line*" (pemikiran yang berbasiskan keuntungan dan mendasarkan segala sesuatu berdasarkan efeknya terhadap pemegang saham) kini menjadi tidak relevan dan berganti menjadi praktik yang berbasiskan "*triple bottom line*" (sosial, lingkungan, ekonomi). Pelaporan *triple bottom line* bertujuan untuk mengedepankan pandangan bahwa pertimbangan perusahaan akan hal-hal keuangan semata sebagai indikator

sukses adalah tidak cukup. Pelaporan perusahaan seharusnya juga merefleksikan dampak sosial (seperti HAM dan isu-isu yang berkaitan dengan karyawan) dan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Pelaporan *triple bottom line* merefleksikan proses yang lebih luas ini dengan menemukan cara-cara yang berarti untuk membobot faktor-faktor ekonomi jangka pendek dengan konsep-konsep seperti HAM dan kelestarian lingkungan.

Akhirnya terbentuklah suatu panduan yang dinamakan *GRI Sustainability Reporting Guidelines* yang pertama sekali muncul dalam bentuk *Draft Exposure* ditahun 1999 yang setelah masa uji coba dan komentar publik, dikeluarkan pada bulan Juni 2000. Saat ini GRI telah mengeluarkan generasi ketiganya yang disebut dengan G3 pada tahun 2006.

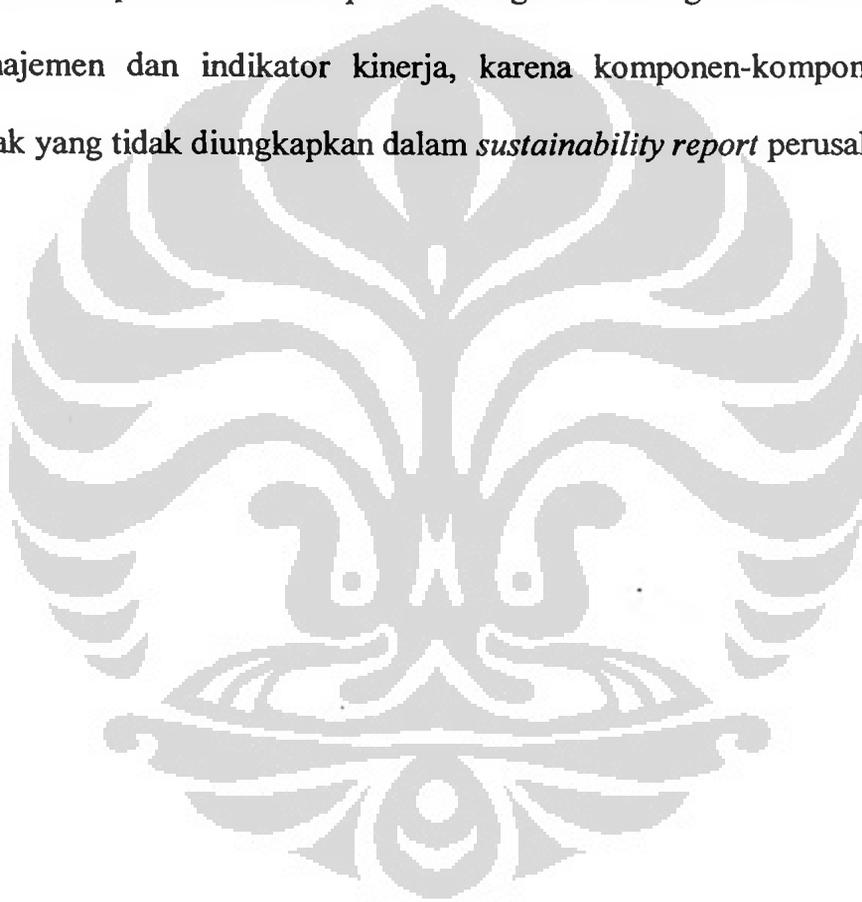
Isi *Sustainability Reporting* (SR), menurut pedoman GRI terdiri dari lima bagian. Pertama, visi dan strategi perusahaan berkaitan dengan *sustainability*. Dalam bagian ini dicantumkan juga pernyataan atau sambutan dari manajemen. Bagian kedua adalah profil perusahaan. Bagian ini merupakan *overview* struktur organisasi operasi perusahaan serta ruang lingkup pelaporan.

Selanjutnya, bagian ketiga mengungkapkan sistem manajemen dan struktur pengelolaan. Dalam bagian ini perusahaan harus mengungkapkan struktur organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan sistem manajemen. Termasuk dalam bagian ini adalah usaha-usaha perusahaan dalam melibatkan *stakeholders*. Bagian berikutnya adalah *GRI Content Index*. Bagian ini berisikan tabel yang mengidentifikasikan letak setiap elemen isi laporan GRI berdasarkan bagian dan indikatornya.

Bagian terakhir dari laporan SR adalah indikator kinerja. Indikator ini mengukur dampak atau efek kegiatan perusahaan. Indikator ini meliputi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya akhir dengan judul ”Analisis *Sustainability Reporting* Asia Pulp and Paper”. Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah *sustainability reporting* Asia Pulp and Paper telah sesuai dengan panduan GRI yang berlaku di Indonesia dan juga sesuai dengan kriteria penilaian menurut IAI-KAM.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang mengeluarkan *sustainability report* untuk pertama kalinya, laporan tersebut adalah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan terutama komponen dari pendekatan manajemen dan indikator kinerja, karena komponen-komponen dari bagian tersebutlah banyak yang tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Analisis Sustainability Reporting Asia Pulp and Paper*, yang mana hal ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi. Mengingat masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis maka penulis mengharapkan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak agar penulisan ini dapat disajikan dengan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penulisan ini penulis dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, tanpa bantuan dan dukungan mereka mungkin penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Lindawati Gani, selaku Sekretaris Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas “ilmu kehidupannya” yang tidak akan di dapat penulis di bangku sekolah maupun kuliah.
3. Ibu Dr. Lindawati Gani dan Bapak Robert Tobing, selaku dosen penguji.
4. Bapak Timotius Lesmana dan Ibu Eka, selaku pembimbing pada saat melakukan penelitian di Asia Pulp and Paper.
5. Dosen-dosen pengajar di lingkungan Universitas Indonesia, yang memberikan ilmunya sehingga penulis dapat mengerjakan penulisan ini.

6. Papa dan Mama yang selalu membantu dan mendukung setiap langkah penulis dan juga tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan moril serta materiil. Serta kedua adikku yang juga selalu memberikan dukungannya.
7. Semua om dan tanteku, khususnya *bou dua* yang selalu mengingatkan penulis agar tidak lupa makan, dan *bou pudan* yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam mengerjakan tesis.
8. Sahabat seperjuangan penulis dalam mengerjakan tesis, Ilia Teresa Cempaka, dan Intan Yunita Ratnasari.
9. Teman-teman angkatan 2006 di Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis pada saat kuliah.
10. Segenap para karyawan Maksi-UI (mbak Debo, mbak Era, mas Bambang, mbak Ira, mas Imung, mas Ichwan, mas Han, Tedi, Jasmani, dan kawan-kawan) yang telah begitu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Maksi.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, karena itu penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Juli 2008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA AKHIR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 <i>Corporate Social Responsibility</i>	9
2.1.1 Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	9
2.1.2 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	13
2.1.3 Manfaat dan Model <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.1.4 Konsep dan Strategi <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
2.1.5 Tahapan Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	28
2.1.6 Panduan Praktis Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	32

2.2 Standar <i>Sustainability Reporting</i>	36
2.2.1 Prinsip-prinsip pelaporan dalam <i>Sustainability Reporting</i>	36
2.2.2 Isi <i>Sustainability Reporting</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Pendirian Perusahaan	41
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	47
3.3 Komposisi Pemegang Saham	47
3.4 Kegiatan CSR Perusahaan	50

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Laporan Ideal Menurut GRI	56
4.2 Analisis Komponen Pelaporan Menurut GRI	57
4.2.1 Strategi dan Analisis	57
4.2.2 Profil Organisasi	58
4.2.3 Parameter Laporan	67
4.2.4 Penyelenggaraan, Komitmen, dan Keterlibatan	70
4.2.5 Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja	80
4.3 Analisis Kriteria Penilaian <i>Sustainability Reporting</i> Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM)...	100
4.3.1 <i>Completeness</i>	101
4.3.2 <i>Credibility</i>	102
4.3.3 <i>Communication</i>	103

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 104

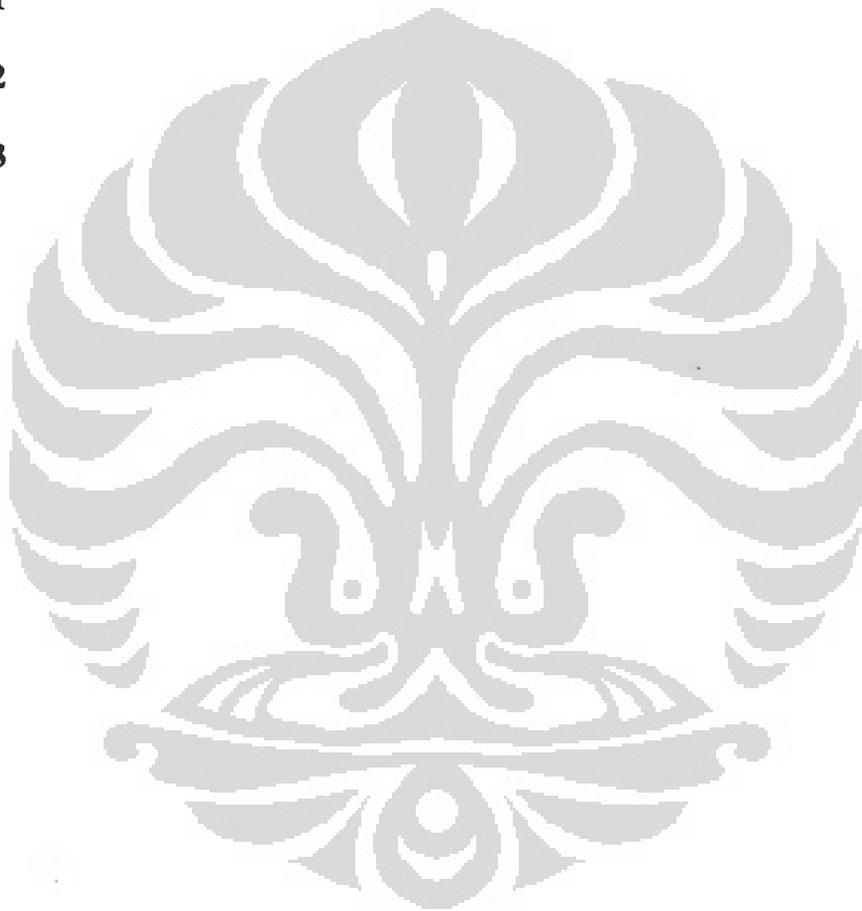
5.2 Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan dan minat pada isu akuntabilitas perusahaan berakar dari kejadian yang berulang-ulang terjadi berkaitan dengan perilaku perusahaan yang tidak bertanggungjawab (*corporate irresponsibility*), yang akhir-akhir ini menjadi lebih terpublikasi. Skandal keuangan yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan hal tersebut seperti aktivitas Unocal yang mempekerjakan tenaga budak di Burma dan pengakuan Shell atas keterlibatannya dalam rezim penindasan di Nigeria merupakan beberapa contoh dari sikap tidak bertanggung jawab perusahaan (Nolan, 2006).

Tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), akuntabilitas perusahaan (*corporate accountability*), pada dasarnya bukanlah suatu konsep baru, hanya saja belum didapatkan suatu kesepakatan umum mengenai pengertian atas konsep ini. Komisi Bisnis Dunia Bagi Pembangunan yang Berkelanjutan (*World Business Council for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab perusahaan sebagai “komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan cara bekerja dengan para karyawan, keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. “*Business for Social Responsibility*”, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat menginterpretasikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu alat untuk melaksanakan hukum, etika, komersial, dan ekspektasi lainnya yang dimiliki masyarakat atas bisnis, dan

membuat keputusan yang secara adil menyeimbangkan tuntutan dari semua *stakeholder*. Ciri utama dari kebanyakan definisi tentang tanggung jawab sosial perusahaan cenderung untuk berfokus pada dampak jangka panjang dari praktik perusahaan dan prinsip-prinsip bahwa organisasi bertanggung jawab atau memiliki kewajiban yang meliputi konstituen yang lebih luas daripada sekedar pemegang saham (*shareholder*).

Tanggung jawab sosial perusahaan sangat berkaitan dengan pelaporan publik (*public reporting*). Saat ini, dorongan akan akuntabilitas perusahaan yang lebih besar seiring dengan permintaan untuk transparansi yang lebih tinggi, ditanggapi oleh beberapa perusahaan dengan mengeluarkan laporan yang memasukkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang mereka lakukan. Pengungkapan (*disclosure*) merupakan tema dari sistem regulasi perusahaan modern dan melibatkan ketentuan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik dalam berbagai cara.

Berkaitan dengan pengungkapan ini, pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa perusahaan harus melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan (materi non-keuangan)? Hal apa yang mendorong bisnis melaporkan hal ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan membangun basis untuk berbagi informasi dengan *stakeholder* dimasa mendatang. Selain itu, mulai merebaknya praktik investasi yang mengutamakan etika (*ethical investing*) menjadi faktor lain yang mempengaruhi hal ini. Minat yang tinggi pada investasi-investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investing/SRI*) yang menjadi semakin intensif akhir-akhir ini, ditandai dengan meningkatnya ukuran SRI dan resolusi pemegang saham atas isu-isu sosial dan lingkungan yang meliputi usaha-

usaha untuk menjaga reputasi perusahaan, strategi manajemen risiko, meningkatkan daya saing perusahaan, dan semakin maraknya isu-isu sosial oleh lembaga swadaya masyarakat dan para konsumen. Seluruh faktor ini meskipun terpisah, merupakan pemicu yang secara bersama-sama meningkatkan tekanan untuk membuat praktik perusahaan yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada lingkup *stakeholder* yang lebih luas dari sekedar pemegang saham perusahaan. Dijalankannya pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social reporting*) adalah indikasi dari satu kenyataan bahwa pertanyaan lama "apakah ini baik bagi pemegang saham?" yang dahulu menjadi satu-satunya motif perusahaan dalam melakukan suatu aktivitas kini tidak lagi dapat terjawab secara terpisah dari pertimbangan atas relevansi isu-isu khusus yang berkaitan dengan *stakeholder* yang lebih luas.

Hal ini berarti, pemikiran "*single bottom line*" (pemikiran yang berbasiskan keuntungan dan mendasarkan segala sesuatu berdasarkan efeknya terhadap pemegang saham) kini menjadi tidak relevan dan berganti menjadi praktik yang berbasiskan "*triple bottom line*" (sosial, lingkungan, ekonomi). Pelaporan *triple bottom line* bertujuan untuk mengedepankan pandangan bahwa pertimbangan perusahaan akan hal-hal keuangan semata sebagai indikator sukses adalah tidak cukup. Pelaporan perusahaan seharusnya juga merefleksikan dampak sosial (seperti HAM dan isu-isu yang berkaitan dengan karyawan) dan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Pelaporan *triple bottom line* merefleksikan proses yang lebih luas ini dengan menemukan cara-cara yang berarti untuk membobot faktor-faktor ekonomi jangka pendek dengan konsep-konsep seperti HAM dan kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pelaporan *triple bottom line* masih merupakan bentuk pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), belum merupakan bentuk pelaporan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*). Namun begitu, telah banyak panduan yang mencoba mengatur bagaimana pelaporan atas hal ini dilakukan. Contohnya saja pelaporan mengenai HAM yang termasuk salah satu elemen dari pelaporan *triple bottom line*. Sejak tahun 1979, sejumlah cara telah dilakukan untuk membuat konsep yang berkaitan dengan aspek HAM, baik dalam bentuk panduan pelaporan sukarela, deklarasi *code of conduct*, yang paling terkenal adalah *Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines for Multinational Enterprises*, *the International Labor Organization's Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy* dan *the International Labor Organization's Tripartite Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Seluruh peraturan ini bersifat tidak mengikat dan meskipun peraturan ini bertujuan menggambarkan secara lebih jelas relevansi HAM atas bisnis dan mendorong perusahaan untuk mempromosikan dan melindungi HAM internasional, tidak ada mekanisme pelaksanaan yang memastikan bahwa tujuan ini terlaksana. Hal tersebut mengakibatkan badan-badan atau organisasi pencetus peraturan-peraturan ini tidak dapat memaksa perusahaan untuk mengubah perilaku tertentu karena wewenang untuk mengajukan perubahan perilaku tetap berada pada kecenderungan politik dan kemampuan dari pemerintah negara dimana perusahaan beroperasi (ICHRP 2002, 99-102).

Pada tahun 2000, PBB (*United Nations*) menyusun *Global Compact*, dimana sekretaris jenderal PBB, Kofi Annan, menyerukan para pemimpin bisnis dunia untuk secara sukarela saling merangkul dalam usaha menyusun peraturan berkaitan dengan praktik perusahaan dimasing-masing negara mereka atas kesepuluh prinsip yang berkaitan dengan HAM, hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan korupsi.

Sebelumnya di tahun 1997, *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *United Nation Environment Programme* (UNEP) membangun inisiatif untuk meluncurkan GRI dengan tujuan peningkatan kualitas, ketegasan, dan utilitas dari *sustainability reporting*. Inisiatif ini mendapat dukungan dan kerjasama perwakilan bisnis, kelompok advokasi nirlaba, badan-badan akuntansi, organisasi investor, serikat buruh, dan banyak pihak lainnya. Bersama-sama, keseluruhan lembaga ini ingin bekerja membangun suatu konsensus atas seperangkat panduan pelaporan yang dapat diterima diseluruh dunia. *GRI Sustainability Reporting Guidelines* pertama sekali muncul dalam bentuk *Draft Exposure* ditahun 1999 yang setelah masa uji coba dan komentar publik, dikeluarkan pada bulan Juni 2000. Saat ini GRI telah mengeluarkan generasi ketiganya yang disebut dengan G3 pada tahun 2006. Harus diakui dengan banyaknya peraturan-peraturan, baik dalam lingkup negara maupun internasional yang lahir berkaitan dengan pelaporan *triple bottom line* bagi perusahaan, bentuk pelaporan yang diajukan oleh GRI masih merupakan bentuk pelaporan dan pengungkapan terlengkap dan komprehensif karena berhasil dalam menggabungkan berbagai indikator kinerja yang dimuat dalam peraturan-peraturan lainnya.

Hal yang sangat disayangkan berkaitan dengan pelaporan *triple bottom line* ini dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah di saat lembaga-lembaga internasional sedang gencar-gencarnya menyusun peraturan terkait dengan usaha menghimbau agar perusahaan-perusahaan menyertakan pelaporan *triple bottom line* dalam laporan publiknya, perusahaan di Indonesia justru tertinggal jauh dibelakang. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa pada tahun 2005 belum satupun perusahaan di Indonesia yang memiliki jenis pelaporan *triple bottom line* secara terpisah dari laporan keuangannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya akhir dengan judul "Analisis *Sustainability Reporting* Asia Pulp and Paper".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya akhir ini adalah:

- i. Apakah Asia Pulp and Paper sudah menerapkan *sustainability reporting* sesuai dengan panduan GRI 2006?
- ii. Apakah *sustainability reporting* Asia Pulp and Paper sesuai dengan kriteria penilaian menurut IAI-KAM?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah *sustainability reporting* Asia Pulp and Paper telah sesuai dengan panduan GRI 2006 dan juga sesuai dengan kriteria penilaian menurut IAI-KAM.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan karya akhir ini adalah:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan merujuk pada panduan yang diberikan oleh GRI dan kriteria penilaian menurut IAI-KAM.
2. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada Asia Pulp and Paper.
3. Bagi penulis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi tulisan selanjutnya mengenai analisis *sustainability reporting* di perusahaan-perusahaan lain.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam studi kasus yang berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

Bab III Profil Perusahaan

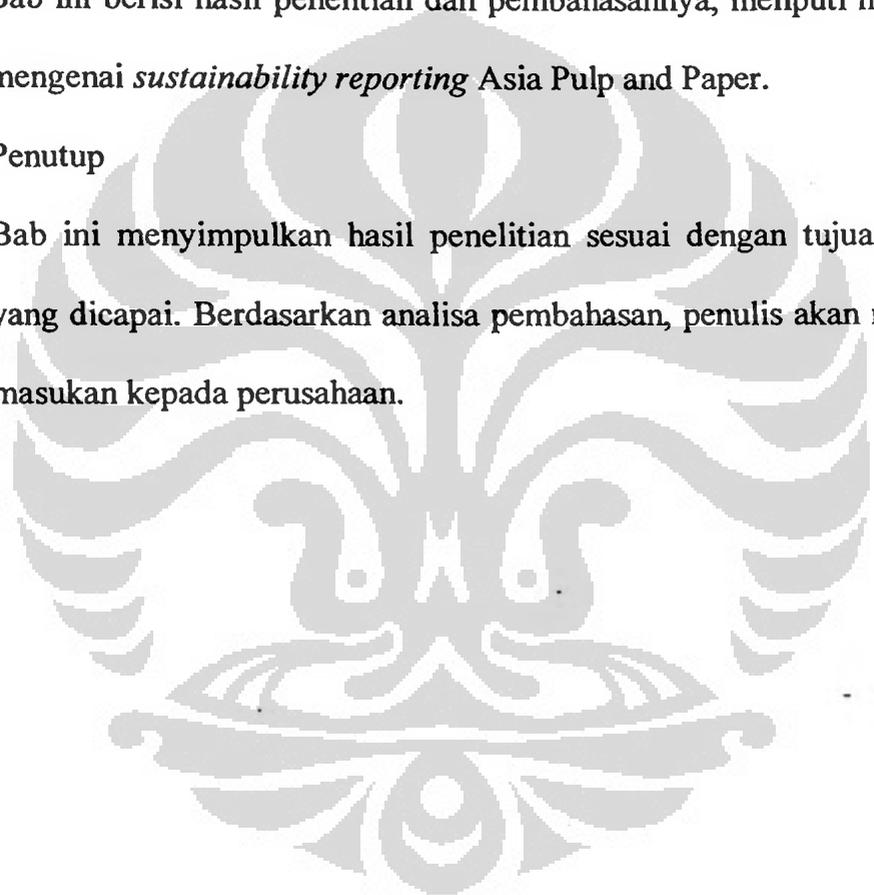
Bab ini menjelaskan profil Asia Pulp and Paper, yang meliputi sejarah pendirian dan perkembangan usaha, visi, misi dan tujuan perusahaan, kegiatan usaha, kepemilikan dan struktur organisasi.

Bab IV Analisa dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, meliputi hasil analisis mengenai *sustainability reporting* Asia Pulp and Paper.

Bab V Penutup

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. Berdasarkan analisa pembahasan, penulis akan memberikan masukan kepada perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Corporate Social Responsibility*

2.1.1. *Sejarah Corporate Social Responsibility*

CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai bapak CSR. Sejak itu sudah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagai negara mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan dalam buku *Bowen*. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi.” Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan. Dalam dekade 1960-an, pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *Iron law of social responsibility*. Dalam konsepnya Davis berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan size atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukan Davis menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak

suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakatnya.

Dalam periode 1970-1980 definisi tentang CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah menulis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan. Menurut Carrol, idealnya sebuah perusahaan memiliki empat macam tanggung jawab sosial, yaitu: ekonomi, hukum, etika dan diskresioner. Tanggung jawab ekonomi sebuah perusahaan adalah bergerak di bidang ekonomi/bisnis. Walau begitu, masyarakat akan menuntut agar perusahaan senantiasa memenuhi tanggung jawab ekonominya tetap dalam kerangka hukum. Tanggung jawab etika adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat untuk diterapkan oleh perusahaan diluar batas-batas hukum. Sementara tanggung jawab diskresioner adalah bagian dari aktivitas filantropi perusahaan yang biasanya dilakukan secara sukarela.

Sejak tahun 1971 literatur yang dikenalkan berisi suatu pembahasan bahwa dunia usaha memiliki multiplisitas kepentingan termasuk *stakeholders*, *supplier*, karyawan, komunitas lokal dan masyarakat suatu bangsa secara keseluruhan. Dari konsep ini kemudian berkembang apa yang dikenal sebagai *stakeholder theory*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui kepentingan berbagai kelompok yang hanya berpikir tentang urusan finansial, tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Dalam dekade ini pula *Committee for Economic Development (CED)* menerbitkan panduan berjudul *Social Responsibilities of Business Corporation*. Panduan ini berisi tiga prinsip

penting. Pertama, perusahaan harus memberi perhatian penuh pada pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat. Kedua, perlu menyadarkan dunia usaha tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat tempat mereka eksis. Ketiga, perlu menyadarkan dunia usaha tentang keprihatinan pada lingkungan hidup dan upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah pedesaan.

Dalam dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai melakukan penelitian tentang manfaat CSR bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya, sampai di sinipun definisi CSR masih kabur dan sulit diseragamkan. Pakar pembangunan Amerika bernama Thomas Jones adalah tokoh yang banyak menulis tentang CSR di berbagai media massa sejak 1980 dan pemikirannya kemudian menjadi acuan di berbagai negara. Intinya adalah ada korelasi positif antara peran perusahaan dalam merealisasikan tanggung jawab sosial dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dekade 1990 adalah periode di mana CSR mendapat pengembangan makna dan jangkauan. Sejak itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk *Corporate Social Performance (CSP)*, *Business Ethics Theory (BET)*, dan *Corporate Citizenship*, sejak itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara. Sejak itu, ada dua metode yang diberlakukan dalam CSR, yaitu *Cause Branding* dan *Venture Philanthropy*. Yang dimaksud *Cause Branding* adalah pendekatan *Top Down*, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Kebalikannya adalah *Venture Philanthropy* yang merupakan pendekatan *Bottom Up*, disini perusahaan membantu berbagai pihak *non-profit* dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Dalam metode *Cause Branding*, perusahaan biasanya mendesain

program sosial yang ada kaitannya dengan *branding* produk atau layanannya, tujuannya membuat masyarakat lebih akrab dengan merek dagang perusahaan itu, tetapi untuk jangka panjang model ini bermanfaat bagi perusahaan, sebab tujuan *Cause Branding* adalah mendekatkan perusahaan kepada masalah yang ada dalam masyarakat lalu membenahi lingkungan sosial itu agar mendukung eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Dalam model *Venture Philanthropy* perusahaan membantu masyarakat untuk menciptakan sendiri sumber-sumber penghidupan baru dan tidak sekadar menyalurkan bantuan sosial atau finansial kepada masyarakat.

CSR ini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia. Teorinya sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada di tengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. Itu sebabnya model CSR yang kini dikembangkan lebih luas jangkauannya dari sekadar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika sosial. Perusahaan membutuhkan masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya, potensi kewirausahaan serta lingkungannya demi menunjang eksistensi usaha di masa depan. Dengan demikian, pelaku bisnis yang *visioner* akan memberikan perhatian besar pada perlunya memberdayakan berbagai potensi masyarakat sebagai unsur penting yang menunjang *survival* perusahaan sejak sekarang. Menurut pendapat penulis model-model CSR yang dikembangkan di Indonesia pun perlu mencakup visi demikian, sebab sebetulnya CSR bukan sekadar urusan kepedulian sosial, melainkan upaya perusahaan secara sadar untuk meningkatkan potensi masyarakat serta lingkungan tempat ia beroperasi demi menunjang eksistensinya.

2.1.2. Definisi *Corporate Social Responsibility*

CSR mempunyai banyak makna berbeda bagi orang yang berbeda pula sehingga definisi CSR cukup banyak terbentuk. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel (2004) yang mendefinisikan CSR sebagai “*A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest*”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab. Sedangkan komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis, yang pada intinya bagaimana perusahaan secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Sedangkan Elkington (1997) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (*planet bumi*).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh THE JAKARTA CONSULTING GROUP, tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan

sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Disamping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan. Karena hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih kesuksesan. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya. Tentu saja hubungan antara perusahaan dengan karyawan ini harus didasarkan pada prinsip hubungan yang saling menguntungkan (*mutually beneficial*). Artinya perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, namun di lain pihak karyawan pun dituntut untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan.

Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal. Demi kelancaran aktivitas perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan tumbuhkembangnya perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja ini akan mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia

bidang apa?” Beberapa definisi CSR lainnya yang kiranya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah:

- Certo dan Certo (2006) mendefinisikan CSR sebagai: “...*managerial obligation to take action that protects and improves both the welfare of society as a whole and the interests of organization.*”
- Lawrance, Weber dan Post (2005) menyatakan: “*CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions affecting people, their communities, and their environment.*”
- Kotler dan Lee (2005) menulis CSR adalah: “...*a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources.*”
- Vogel (2005) mendefinisikan CSR sebagai: “...*policies and programs of private firms that go beyond legal requirements as a response to public pressures and societal expectations.*”
- Hopkins (2004) memberikan definisi: “*CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. ‘Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation.*”
- World Business Council for Sustainable Development – WBCSD (2002) menyatakan: “*Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*”

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh *World Bank*. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*”

Lalu bagaimana dengan definisi CSR versi Indonesia? Dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai “Tanggung Jawab Sosial Korporasi” atau “Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus)”. Memang, masih diperlukan kajian tersendiri untuk mencari padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Namun umumnya, bila disebut salah satu darinya, konotasinya pastilah kembali kepada CSR. Selanjutnya, dari sisi definisi, saat ini juga belum ditemui kesepakatan bakunya, tetapi bisa dimaklumi mengingat CSR adalah sebuah konsep yang berkembang dengan cepat, sehingga definisinya pun bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan perkembangannya. Namun demikian, kendatipun tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan suatu kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. Sehingga menurut Yusuf Wibisono (2007), CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.1.3. Manfaat dan Model *Corporate Social Responsibility*

Pro dan kontra CSR sebetulnya tidak perlu terjadi, jika perusahaan yang mau memahami dan menyadari arti pentingnya CSR ini. Setidaknya tiga alasan dibawah ini dapat menjawab pertanyaan mengapa dunia usaha harus merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karena itu, wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat.

Kedua, dunia usaha dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, paling tidak dalam hal lisensi untuk beroperasi, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi hubungan di antara keduanya bahkan dapat meningkatkan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu dapat berasal dari akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dan perusahaan.

Menurut Lawrence, Weber dan Post (2008, 50), argumen pro dan kontra terhadap CSR adalah sebagai berikut:

Argumen Pro CSR/TJSP	Argumen Kontra-CSR/TJSP
☞ Mengimbangi kekuasaan korporasi dengan tanggung-jawab	☞ Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan bisnis
☞ Mengurangi peraturan pemerintah	☞ Mengakibatkan biaya yang tidak setara antar pesaing bisnis
☞ Mempromosikan keuntungan jangka panjang bisnis	☞ Mengakibatkan biaya terselubung yang diteruskan pada biaya pemangku kepentingan
☞ Responsif terhadap tuntutan pemangku kepentingan	☞ Menuntut keterampilan sosial yang tidak dimiliki bisnis
☞ Mengoreksi permasalahan sosial akibat tindakan bisnis	☞ Membebankan tanggung jawab pada bisnis bukan pada individu

Selain itu, Griffin (2000, 41) juga mengemukakan argumen mengenai pandangan kelompok yang pro dan kontra terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

No	Pandangan Kelompok yang Pro terhadap tanggung jawab sosial dari Organisasi Bisnis	No	Pandangan Kelompok yang Kontra terhadap tanggung jawab sosial dari Organisasi Bisnis
1	Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinyalah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.	1	Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab.
2	Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat.	2	Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial
3	Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat.	3	Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas social.
4	Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya.	4	Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan.

Selanjutnya manfaat CSR menurut Yusuf Wibisono (2007) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal non finansial utama bagi perusahaan bagi *stakeholders*-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2. Layak mendapatkan *social license to operate*

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan menghasilkan harmonisasi dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan

Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan harus menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan misalnya disharmoni dengan *stakeholders* hingga pembatalan atau penghentian operasi, yang ujungnya akan merusak dan menurunkan reputasi bahkan kinerja perusahaan. Bila hal itu

terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga mesti mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipat besarnya dibanding biaya untuk mengimplementasikan CSR. Karena itu, menempuh langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan CSR merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan.

4. Melebarkan akses sumber daya

Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

5. Membentangkan akses menuju pasar

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi jalan bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk realitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sudah banyak bukti akan penolakan konsumen terhadap produk-produk yang tidak patuh pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.

6. Mengurangi biaya

Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Yang mudah dipahami adalah upaya untuk mengurangi limbah melalui proses daur ulang ke dalam siklus produksi. Di samping mengurangi biaya, proses ini tentu juga mengurangi pembuangan ke luar sehingga menjadi lebih aman.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*

Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentuk kepercayaan kepada perusahaan.

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterahkan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Disamping itu reputasi perusahaan yang baik di mata *stakeholders* juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya.

10. Peluang mendapatkan penghargaan

Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai *kans* yang cukup tinggi.

Sedangkan, menurut Sonny Sukada, dkk. (2007, 128) inisiasi penyelenggaraan CSR umumnya dibedakan menjadi dua model besar: reaktif dan proaktif.

1. CSR Reaktif

Model pertama merupakan reaksi pihak perusahaan setelah mendapat tekanan dari komunitas lokal. Di sejumlah perusahaan besar tekanan ini biasanya meluas karena pemberitaan media massa atau publikasi Ornop, yang mengakibatkan terlibatnya pihak berkapasitas lebih besar dari kekuatan masyarakat sendiri. Persoalan yang dihadapi biasanya berkenaan dengan ketidaktuntasan penanganan masalah penguasaan lahan, perubahan kualitas lingkungan, dan serapan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, perusahaan berupaya mempertahankan atau bahkan memperbaiki citra dan keamanan bagi kelangsungan operasinya.

2. CSR Proaktif

Model kedua datang dari perusahaan yang sepenuhnya menyadari pentingnya CSR sebagai bagian strategi bisnis. Model ini mulai ditemukan utamanya di kalangan perusahaan multinasional, yang berhubungan dengan rencana eksplorasi atau masa awal pembebasan lahan untuk lokasi proyek, di mana sejumlah strategi dipersiapkan agar proses masuknya modal menjadi mulus. Para pemerhati CSR menyebutkan, jika model ini direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau dengan matang, jauh lebih efektif dibanding model pertama. Dukungan masyarakat, berupa ijin sosial maupun proses kerjasama berkelanjutan bagi agenda perbaikan kualitas kehidupan dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan, membuat operasi perusahaan memperoleh citra positif para pemangku kepentingannya dan jaminan keamanan jangka panjang.

2.1.4. Konsep dan Strategi *Corporate Social Responsibility*

CSR sering dianggap perusahaan sebagai aktivitas yang kurang penting dan cenderung menjadi ajang aktivitas untuk "buang-buang duit" karena tidak menghasilkan profit sama sekali dan kontribusi bagi perusahaan. Dan dapat dilihat bagaimana perkembangan CSR saat ini, akibatnya kegiatan ini sangatlah kurang berkembang. Kegiatan masih sebatas pada pemberian donasi atau sumbangan, tanpa efek yang berlanjut yang nantinya juga akan berdampak kepada lingkungan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, sebaliknya CSR jika diolah sedemikian rupa dapat dijadikan strategi bagi perusahaan.

Strategi CSR adalah pendekatan yang mensinergikan CSR dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. sinergi ini diperoleh ketika perusahaan memberi kontribusi pada lingkungan sosialnya sesuai dengan *core competency*-nya atau kata lainnya adalah CSR harus juga memberikan keuntungan bagi perusahaan.

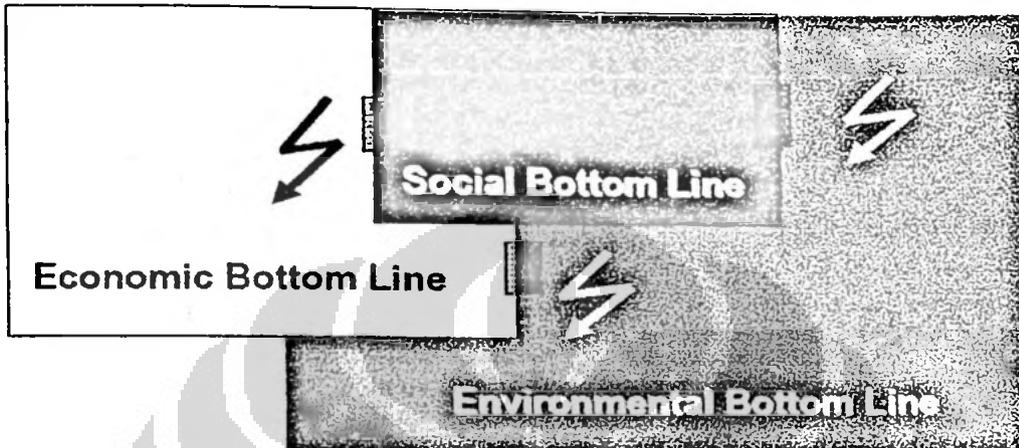
Ada dua alasan mendasar mengapa CSR mempunyai peran strategis. Pertama, dari sudut internal (perusahaan) ada sejumlah alasan fundamental, yaitu (a) sejatinya perusahaan merupakan asset masyarakat karena eksistensi perusahaan bisa tergantung kepada masyarakat, (b) posisi perusahaan sesungguhnya merupakan salah satu *stakeholder* negara kerakyatan, (c) sehingga eksistensi sebuah bangsa dan negara bisa ditentukan oleh eksistensi perusahaannya, (d) perusahaan berbasis masyarakat merupakan kebutuhan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, (e) dukungan masyarakat merupakan jaminan eksistensi perusahaan, (f) saat ini dan untuk masa mendatang CSR merupakan ciri utama perusahaan modern (madani), (g) bagi perusahaan, CSR juga bisa merupakan alat pertahanan perusahaan, (h) bagi

perusahaan, CSR bisa merupakan alat bargaining dengan stakeholder (masyarakat, kompetitor, pemerintah), (i) bagi perusahaan, CSR bukan sekadar alat politik praktis perusahaan, tetapi semestinya sebagai bagian dari strategi perusahaan itu sendiri, (j) bahkan bagi perusahaan, CSR bisa menjadi barometer kinerja sebuah perusahaan PR (public relation) yang murah, dan (k) lebih dari itu, kekuatan peran CSR terhadap masyarakat akan menyebabkan perusahaan disayang masyarakat sekaligus dicintai Tuhan.

Kedua, alasan eksternal (masyarakat) : (1) Masyarakat merupakan stakeholder bagi perusahaan. Masyarakat merupakan *resources* utama bagi perusahaan. Masyarakat sebagai mesin bagi perusahaan karena dari masyarakatlah perusahaan memiliki tenaga kerja dan buruh. Masyarakat sebagai pelanggan dan konsumen utama perusahaan. Sehingga tanpa peran sosial perusahaan, masyarakat pun bisa menjadi sumber ancaman bagi perusahaan. Oleh karena itu mengelola masyarakat harus merupakan salah satu peran CSR. Dalam implementasinya masyarakat bukan semata-mata objek perusahaan, tetapi masyarakat pun merupakan subjek bagi perusahaan. (2) Kondisi laten masyarakat kita yang masih pekat diwarnai kemiskinan dan keterbelakangan, maraknya berbagai penyakit sosial masyarakat lainya seperti kriminalitas, pengangguran, pelacuran, mental inferior, tuna wisma, dan sejenisnya yang akan potensial menjadi ancaman masa depan bangsa. (3) Kondisi temporer masyarakat : seringnya masyarakat dilanda bencana alam dan konflik. Dampak bencana bisa menimbulkan berbagai penyakit sosial masyarakat, termasuk semakin maraknya kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan bencana bisa menjadi salah satu

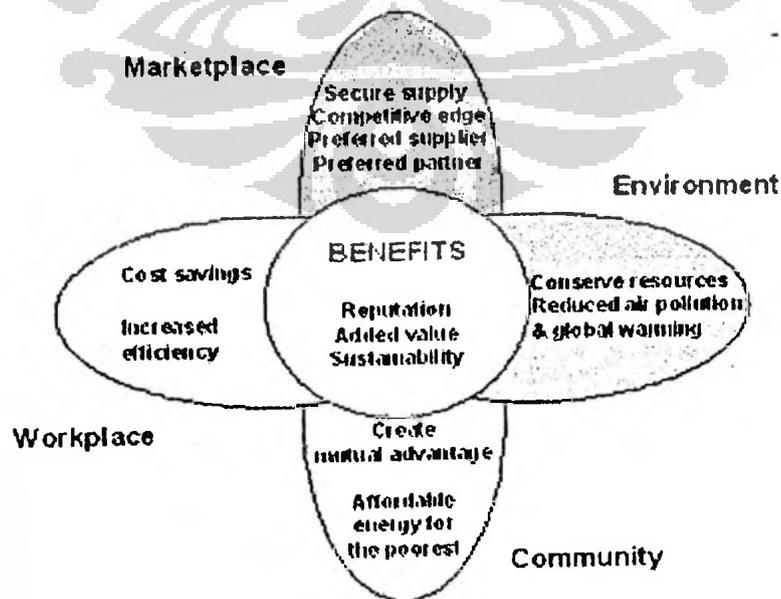
peran strategis perusahaan melalui CSR, khususnya pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Konsep strategi CSR yang umumnya disebut dengan konsep *triple bottom line* dapat dilihat seperti berikut ini :



(“Cannibals with Forks – the Triple Bottom Line of 21st Century Business” – John Elkington, 1998)

Gambar di atas menunjukkan bagaimana efek CSR bila dilakukan perusahaan secara sungguh dan terencana. Strategi CSR dapat mempengaruhi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial, atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Sumber: <http://www.ihsa.or.id>

Dalam lingkungan hidup misalnya perusahaan dapat menerapkan produk yang ramah lingkungan atau menerapkan pengolahan limbah yang ramah lingkungan atau bisa juga perusahaan memilih penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk mengurangi efek dari global warming yang sekarang efeknya sudah mendunia, atau perusahaan peduli terhadap lingkungan misalnya peduli terhadap terumbu karang atau coral reef yang sekarang mulai banyak dirusak perusahaan, misalnya juga dapat berperan aktif di dalam konservasinya.

Dalam bidang sosial misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap para kaum miskin lewat pelatihan-pelatihan dan memberikan akses pendidikan kepada mereka sehingga mereka tidak akan merasa termajinakan oleh industrialisasi atau perusahaan juga dapat menciptakan sumber daya yang terjangkau bagi masyarakat lemah. Dalam hal ini bisa juga penerapan CSR secara internal yaitu keterpedulian terhadap karyawan perusahaan.

Dalam lingkungan ekonomi atau pasar misalnya perusahaan tetap menjaga hubungan yang baik dengan supplier ataupun distributor, tidak malahan mengakali mereka dan mengabuse mereka, tetapi berikanlah penghargaan kepada mereka atas kontribusi mereka terhadap perkembangan perusahaan. Intinya CSR adalah strategi yang melibatkan keseluruhan dari stakeholder perusahaan, tidak bisa berjalan sendiri dan terpisah karena ini adalah suatu sistem.

2.1.5. Tahapan Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan pertahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*, *CSR Assesement*, dan *CSR Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain. *CSR Assesement* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membangun *CSR Manual*. Hasil *assesement* merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instant, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini merupakan inti dari perencanaan, karena manual inilah *kitab suci* yang memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Tahap Implementasi

Dalam memulai implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang mesti dijawab. Siapa orang yang akan menjalankan, apa yang mesti dilakukan, serta bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi:

- pengorganisasi (*organizing*) sumber daya yang diperlukan
- penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya
- pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
- pengawasan atau koreksi (*controlling*) terhadap pelaksanaan
- pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
- penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR dapat yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Sedang internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan misalnya melalui sistem manajemen kinerja,

prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekadar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tapi sudah *beyond compliance*.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Kadang ada kesan, evaluasi dilakukan bila satu program gagal. Sedangkan bila program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi mestinya tetap dilakukan, baik saat kegiatan itu berhasil atau gagal. Bahkan kegagalan atau keberhasilan bisa diketahui setelah kegiatan atau program tersebut dievaluasi. Dan evaluasi ini dilakukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan. Langkah ini tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk *assessment audit* atau *scoring* juga dapat dilakukan secara mandatori. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

4. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholders* lainnya yang memerlukan.

2.1.6. Panduan Praktis Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Salah satu cara mudah bagi perusahaan untuk mempraktikkan dan mengembangkan program CSR adalah dengan mempelajarinya dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih sukses dalam implementasi program ini. Istilah umumnya adalah *benchmarking*. Tentu, tidak seluruh program yang bagus diimplementasikan di perusahaan lain langsung cocok diimplementasikan di perusahaan anda. Harus ada kreativitas untuk modifikasi agar program tersebut *inline* dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Hal ini dapat dipahami bahwa masing-masing perusahaan mempunyai karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Program yang *well implemented* di perusahaan ekstraksi misalnya, tidak akan serta merta cocok bila dipraktikkan di perusahaan jasa. Tidak ada teknik baku yang berlaku umum dan dapat diterapkan secara persis oleh semua perusahaan. Karena itu tersedia cukup ruang untuk berkreasi dan memodifikasi program-program yang diadopsi dari perusahaan yang berhasil sekalipun.

Dengan demikian, sulit rasanya mencari "*best practice*" suatu program CSR. Karena pasti tidak ada program yang secara *koor* diamini oleh segenap perusahaan

untuk *dicopy* kemudian di *paste*-kan di perusahaan lain tanpa adanya modifikasi yang diperlukan. Karenanya mungkin bisa dimaklumi bila ada yang mengatakan bahwa tidak ada resep “cespleng” yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan CSR ini. Yang bisa dilakukan barangkali adalah mencoba untuk mengenali prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani untuk penerapan CSR secara umum. Beberapa di antaranya akan diuraikan dibawah ini.

1. Menyusun Perencanaan Program CSR

Secara umum, kita mengenal perencanaan itu terbagi menjadi perencanaan jangka pendek (rencana operasional) dan rencana jangka panjang (rencana strategis). Atau bahkan ada yang menambah lagi dengan perencanaan jangka menengah. Periodenya walaupun tidak ada kesepakatan tunggal, umumnya berkisar satu tahun untuk rencana jangka pendek, sampai dengan lima tahun untuk rencana jangka menengah dan diatas lima tahun untuk rencana jangka panjang. Langkah-langkah yang biasa ditempuh antara lain meliputi:

- a) Menetapkan Visi
- b) Memformulasikan Misi
- c) Menetapkan Tujuan
- d) Menetapkan Kebijakan
- e) Merancang Struktur Organisasi
- f) Menyediakan SDM
- g) Merencanakan Program Operasional
- h) Membagi Wilayah
- i) Mengelola Dana

2. Implementasi Program CSR

Implementasi program CSR dapat dikelola berdasarkan pola sebagai berikut:

a) Program Sentralisasi

Perusahaan sebagai pelaksana/penyelenggara utamakegiatan. Begitupun tempat, kegiatan berlangsung di area perusahaan. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan bisa bekerjasama dengan pihak lain sejauh memiliki kesamaan visi dan tujuan.

b) Program Desentralisasi

Kegiatan dilaksanakan diluar area perusahaan. Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut baik dalam bentuk bantuan dana, material maupun sponsorship.

c) Program Kombinasi

Pola ini dapat dilakukan terutama untuk program-program pemberdayaan masyarakat, dimana inisiatif, pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *partisipatoris* dengan *beneficiaries*.

3. Evaluasi Program CSR

Langkah selanjutnya, setelah program CSR diimplementasikan adalah mengevaluasi program. Evaluasi bisa dilakukan harian, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Evaluasi biasanya memotret apa kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan dan apa masalah yang muncul serta apa solusi yang akan diambil. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

- a) Memberi masukan pada perencana program atau kegiatan
- b) Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Apakah program/kegiatan akan dilanjutkan, dikembangkan atau dihentikan
- c) Memberi masukan untuk memodifikasi program/kegiatan
- d) Mendapatkan informasi tentang pendukung dan penghambat program/kegiatan
- e) Sebagai upaya untuk melakukan tindakan perbaikan

4. Reporting Program CSR

Apa yang mesti dilakukan perusahaan yang menggelar program CSR setelah melewati serangkaian proses panjang sejak desain atau perencanaan program, implementasikan program hingga evaluasi program? Idealnya, perusahaan juga membuat laporan (*reporting*) sebagai fase pamungkasnya. Hal ini dimaksudkan agar selain bisa digunakan untuk bahan evaluasi, juga bisa menjadi alat komunikasi dengan *shareholder* dan *stakeholdernya*. Pada umumnya format *report* mengandung unsur-unsur antara lain:

- a) *CEO Statement*
- b) Profil perusahaan
- c) Ruang lingkup
- d) Dampak
- e) Tata kelola
- f) Kebijakan-kebijakan
- g) Sistem manajemen dan prosedur
- h) Hubungan dengan *stakeholder*
- i) Kinerja dan pemenuhan terhadap standar

- j) Target dan pencapaiannya
- k) Penghargaan-penghargaan/*external assurance*

2.2. Standar *Sustainability Reporting*

2.2.1. Prinsip-prinsip pelaporan dalam *Sustainability Reporting*

Prinsip-prinsip pelaporan dalam *Sustainability Reporting* (SR) menurut Kementerian Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi empat.

Pertama, kelompok kerangka kerja laporan. Kelompok pertama ini meliputi transparansi, inklusif, dan dapat diaudit (*auditable*). Prinsip transparansi dan inklusif merupakan titik awal dalam proses pelaporan dan sebagai arah dari prinsip pelaporan lainnya. Berdasarkan prinsip transparansi ini, kredibilitas perusahaan ditentukan oleh keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan. Keterbukaan informasi yang disampaikan dalam SR meliputi proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan harus mengungkapkan metode pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan audit internal, serta asumsi ilmiah yang menjadi dasar penyajian informasi. Prinsip inklusif ini berarti bahwa pengorganisasian pelaporan harus secara sistematis melibatkan para *stakeholders* untuk membantu fokus perusahaan dan secara kontinyu meningkatkan kualitas pelaporan. Prinsip ini didasarkan pada premis bahwa pandangan *stakeholders* sangat berarti dalam pelaporan SR dan harus diakomodasi selama proses pembuatan laporan. Aspek-aspek pelaporan yang dapat dikonsultasikan dengan *stakeholders*, antara lain pemilihan indikator, format pelaporan dan pendekatan yang diambil untuk meningkatkan kredibilitas informasi pelaporan. Selanjutnya, dengan prinsip dapat

diaudit, data dan informasi yang dilaporkan harus dicatat, dikompilasi, dianalisa, dan diungkapkan dengan suatu cara tertentu dimana auditor internal atau eksternal dapat menguji keandalan data dan informasi tersebut.

Kelompok kedua, merupakan informasi apa yang akan dilaporkan. Kelompok ini meliputi kelengkapan informasi, relevansi informasi yang disajikan, dan keterkaitannya dengan konteks *sustainability*. Laporan harus menyajikan kinerja organisasi yang meliputi tantangan, risiko, dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam konteks *sustainability*. Selain itu, informasi yang disajikan juga harus lengkap, mempunyai ruang lingkup dan kerangka waktu yang jelas.

Kelompok ketiga, berhubungan dengan kualitas dan keandalan informasi atau data. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah prinsip akurasi, netralitas, dan dapat dibandingkan. Laporan yang disajikan harus cukup akurat dan dapat diandalkan sebagai bahan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, informasi yang disajikan juga tidak boleh bias dan harus disajikan secara berimbang. Selain itu, suatu laporan juga harus dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu dan antar perusahaan.

Kelompok terakhir, adalah akses atas informasi yang dilaporkan. Prinsip-prinsip untuk kelompok ini adalah kejelasan dan tepat waktu. Prinsip ini memberikan arah akses dan ketersediaan informasi. Secara sederhana, *stakeholders* bisa memperoleh secara mudah dan informasi tersebut tersedia dalam kurun waktu yang diperlukan.

Pada akhirnya, prinsip dapat diaudit berkaitan dengan beberapa prinsip lainnya, seperti keakuratan, netralitas, kelengkapan, dan dapat diperbandingkan.

Secara khusus, prinsip diaudit juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyiapkan laporan dan informasi yang dilaporkan memenuhi standar kualitas, keandalan, dan ekspektasi lainnya.

2.2.2. Isi *Sustainability Reporting*

Pedoman GRI menurut Satyo (2005) membahas isi *Sustainability Reporting* (SR) dalam suatu bagian tersendiri. Isi SR, menurut pedoman GRI terdiri dari lima bagian. Pertama, visi dan strategi perusahaan berkaitan dengan *sustainability*. Dalam bagian ini dicantumkan juga pernyataan atau sambutan dari manajemen. Bagian kedua adalah profil perusahaan. Bagian ini merupakan *overview* struktur organisasi operasi perusahaan serta ruang lingkup pelaporan.

Selanjutnya, bagian ketiga mengungkapkan sistem manajemen dan struktur pengelolaan. Dalam bagian ini perusahaan harus mengungkapkan struktur organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan sistem manajemen. Termasuk dalam bagian ini adalah usaha-usaha perusahaan dalam melibatkan *stakeholders*. Bagian berikutnya adalah *GRI Content Index*. Bagian ini berisikan tabel yang mengidentifikasi letak setiap elemen isi laporan GRI berdasarkan bagian dan indikatornya. Tujuan bagian ini adalah untuk memudahkan pengguna laporan agar dapat mengakses secara cepat informasi dan indikator yang terdapat dalam Pedoman GRI.

Bagian terakhir dari laporan SR adalah indikator kinerja. Indikator ini mengukur dampak atau efek kegiatan perusahaan. Indikator ini meliputi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ekonomi terdiri satu kategori: dampak

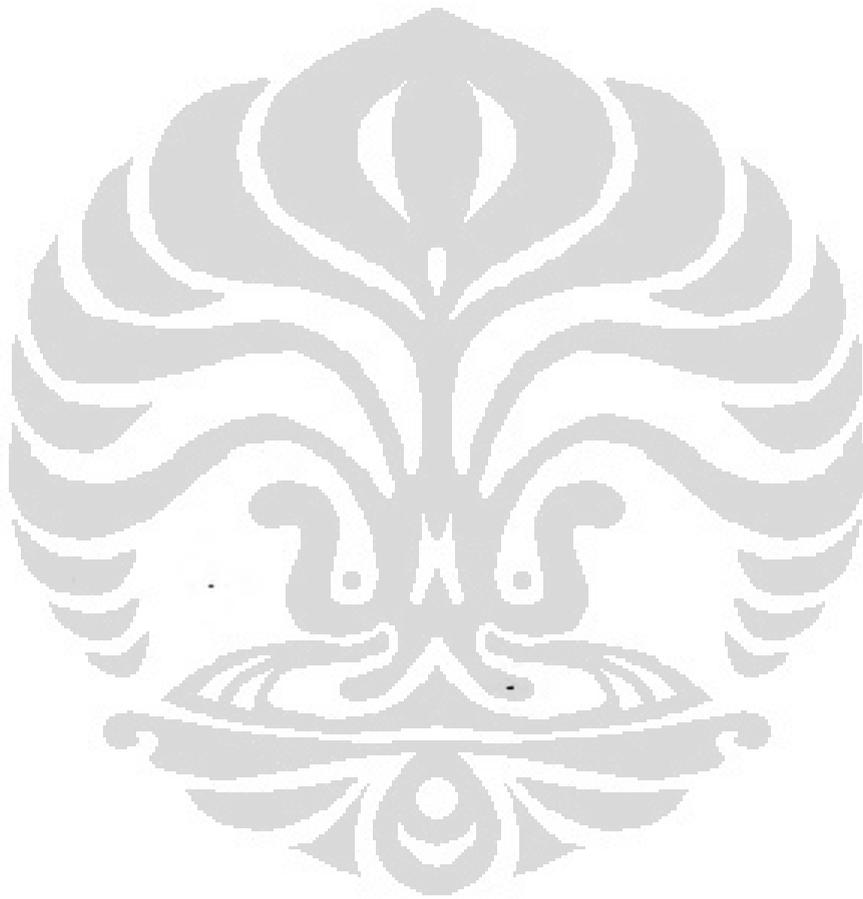
ekonomi secara langsung. Dampak ini meliputi beberapa aspek, antara lain: pelanggan, pemasok, karyawan, sektor publik, dan penyedia dana atau investor.

Indikator lingkungan juga hanya terdiri dari satu kategori, yaitu lingkungan. Namun, aspek-aspek yang dinilai lebih banyak. Aspek lingkungan yang dinilai antara lain: energi, air, emisi dan limbah. Selain itu, juga aspek biodiversity, produk dan jasa, ketaatan terhadap peraturan, transportasi, dan keseluruhan lingkungan.

Indikator terakhir adalah sosial. Indikator ini terdiri dari empat kategori. Pertama, pekerjaan dan tenaga kerja. Dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain: hubungan perusahaan dengan tenaga kerja; kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan dan pendidikan yang dilakukan perusahaan pada tenaga kerja; serta penyebaran dan kesempatan tenaga kerja. Kategori kedua, hak asasi manusia. Dalam kategori ini, aspek yang dinilai antara lain: tidak adanya diskriminasi pada tenaga kerja; adanya kebebasan karyawan dalam membentuk serikat kerja; tenaga kerja anak-anak; dan penegakan disiplin.

Kategori selanjutnya, adalah masyarakat. Kategori ini meliputi pengembangan masyarakat sekitar perusahaan, perlakuan terhadap korupsi, kompetisi dan penentuan harga, serta pengaruh politik terhadap perusahaan. Dan, kategori terakhir, yaitu tanggung jawab terhadap produk. Indikator ini meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen; produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan; iklan yang ditawarkan; serta penghormatan terhadap privasi pelanggan.

Dari pedoman GRI ini, tampak jelas potret perusahaan secara lebih lengkap. Bagaimana perusahaan beroperasi dan apa dampak tergambar dalam SR. Oleh karena yang diperlukan perusahaan bukan hanya aspek ekonomi, maka SR perlu segera dimasyarakatkan dan dilaksanakan.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Pendirian Perusahaan

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia dalam kerangka Undang – undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H. No. 68 tanggal 7 Desember 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. No. 141 tanggal 30 Juni 1998 mengenai perubahan nama dan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C-2701 HT.01.04.Th.99 tanggal 12 Pebruari 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No. 7966 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 2000.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (“Indah Kiat” atau “Perseroan”) didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dengan nama CV. Berkat dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi pabrik di Tangerang, Propinsi Banten. Perseroan mulai memproduksi kertas woodfree sejak tahun 1978. Pada tanggal 6 Juli 1983, nama

Perseroan diubah menjadi PT. Berkat Indah Agung. Pada tahun 1986, nama perseroan diganti menjadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan selanjutnya pada tahun 1996 menjadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk. Sejak tahun 1998, nama perusahaan menjadi PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. Pada tahun 1990, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan alamat di jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu Perawang (Riau) serta Tangerang dan Serang (Banten). Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*linerboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping countainers* (konversi dari *countainerboard*).

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (Perusahaan) didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1972 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H. No. 9. Perusahaan terdaftar sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri pada tanggal 28 Pebruari 1975 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo Undang-undang No. 12 tahun 1970. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975 serta diumumkan dalam

Tambahan No. 639 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 30 Agustus 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mengenai, antara lain, perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 dan perubahan untuk menyesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-5893 HT.01.04.TH'99 tanggal 1 April 1999 serta diumumkan dalam Tambahan No. 6265 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2001, akan tetapi, perubahan tersebut belum efektif di bursa efek.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha Perusahaan meliputi bidang industri antara lain, *pulp*, kertas dan hasil-hasil produksi kertas. Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur dengan kantor pusat dan pabriknya berlokasi di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977.

3. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Perusahaan") didirikan di Indonesia dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970. Pendirian Perusahaan berdasarkan Akta No. 44 dari Notaris Malem Ukur Sembiring, S.H. tanggal 13 Februari 1974. Anggaran Dasar Perusahaan telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y. A. 5/263/11 tanggal 7 Mei 1976 dan diumumkan dalam Tambahan No. 6235 pada Berita Negara No. 60 tanggal 28 Juli 1995. Anggaran Dasar Perusahaan sudah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta No. 69 dari Notaris Linda Herawati, S.H. tanggal 31 Januari 2001 mengenai perubahan pasal 11, 22, 25, 26, dan 27. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C-07942 HT.01.04.TH.2001 tanggal 10 September 2001.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dibidang industri kertas. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, Indonesia dengan kantor pusat berlokasi di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dan pabrik Perusahaan berlokasi di Tebing Tinggi, Jambi. Perusahaan memulai usaha komersialnya sejak tahun 1976.

Kegiatan usaha Perseroan adalah memproduksi bubur kertas (*pulp*), tissue, dan kertas. Perseroan mulai memproduksi kertas pada tahun 1976, bubur kertas pada tahun 1994, dan tissue pada tahun 1998 dengan keseluruhan kapasitas produksi kertas terpasang saat ini adalah sebesar 7.500 ton per tahun, bubur kertas (*pulp*) sebesar 680.000 ton per tahun dan tissue sebesar 60.000 ton per tahun.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills yang merupakan salah satu produsen kertas dan tissue di Indonesia. Gabungan kedua perusahaan tersebut menjadi salah satu produsen bubur kertas, kertas, dan tissue yang terintegrasi vertikal terbesar di dunia. Perseroan menjual produk bubur kertas dan tissue di pasar domestik dan ekspor.

4. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Company

PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills (“Perusahaan”), suatu perseroan terbatas, didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Didi Sudjadi, S.H. No. 75 tanggal 31 Januari 1975, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975, No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Pebruari 1976. Akta-akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan no. 49 tanggal 27 Juni 1979 dari Notaris Eliza Pondang, S.H. yang kesemuanya itu diumumkan dalam Tambahan No. 1274 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 1982.

Berdasarkan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) No. 41/V/1992 tanggal 3 Nopember 1992, status Perusahaan telah diubah dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”). Selanjutnya, pada tanggal 28 Pebruari 1997, Perusahaan merubah statusnya dari PMA kembali menjadi PMDM, dimana untuk itu Perusahaan telah memperoleh persetujuan BKPM melalui suratnya No. 06/V/PMDM/1997.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan dilakukan dengan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. No. 81 tanggal 31 Juli 2002 mengenai perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2002 melalui Surat Keputusan No. C-20614.HT.01.04.TH.2002.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan dan pertambangan, saat ini kegiatan usaha Perusahaan adalah memproduksi dan menjual kertas, barang pengemas dan barang sejenis lainnya untuk pasar lokal dan ekspor.

Perseroan menghasilkan produk kertas berkualitas tinggi, diantaranya: *Carbonless Paper, cast Coated Paper, Photocopy Paper, Tissue, Art Paper, Uncoated Woodfree Paper*, dan kertas-kertas khusus seperti *Embossed Paper*. Produk Perseroan menggunakan merek dagang yang cukup terkenal di bidang industri antara lain seperti *Bola Dunia, Golden Coin, Golden Star, Lucky Boss, Mirage, Specta Colour, Buffalo Hide, Paseo, Nice, Livi* dan *Jolly*.

Perseroan telah menginvestasikan teknologi mutakhir seperti *ABB Computer Controlled Off Line* dan *On Line Blade to Blade* untuk menjamin konsentrasi kualitas dari produk dan dan otomatisasi mesin *ream* dan *roll wrapping, synchronized sheet cutters, cut size sheeters* dan *pallet shrink wrappers* yang semuanya diperlukan untuk menghasilkan produk sesuai permintaan pasar dengan kualitas dunia.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978. Produk Perusahaan dijual di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan secara keseluruhan (APP) adalah:

“Menjadi perusahaan bubur kertas (pulp) dan kertas nomor satu di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21 yang berdedikasi memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan dan masyarakat”.

Misi perusahaan secara keseluruhan (APP) adalah:

- Meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia
- Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan.
- Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasi

3.3. Komposisi Pemegang Saham

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Berdasarkan catatan Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita, komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

a) PT. Purinusa Ekapersada	57,72%
b) CHP International (BVI) Corp.	1,80%
c) YFY Global Investment (BVI) Corp.	0,77%
d) YFY HK Company limited	0,05%
e) Masyarakat lainnya	44,66%

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Anak Perusahaan yang Mayoritas atau 100% Dimiliki

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	% Kepemilikan
Tjiwi Kimia International Finance Company B.V.	Bidang Keuangan	100%
PT Mega Kertas Pratama	Distributor	99%
Tjiwi Kimia Trading III (BVI) Limited	Distributor	100%
Tjiwi Kimia Finance Mauritius Limited	Bidang Keuangan	100%
Tjiwi Kimia Trading Limited	Distributor	100%
Tjiwi Kimia Trading (II) Limited	Distributor	100%
Tjiwi Kimia Import & Export Ltd	Distributor	100%
Tjiwi Kimia Finance B.V.	Bidang Keuangan	100%
Marshall Enterprise Ltd.	Bidang Keuangan	100%

3. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Mayoritas saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills (Pindo Deli), dimana Pindo Deli dikendalikan oleh PT Purinusa Ekapersada ("Purinusa") yang pada tanggal 31 Desember 2004 dimiliki oleh Asia Pulp & Paper Company Ltd. ("APP"), Singapura. Pada tahun 2005 kepemilikan APP di Purinusa terdilusi sejak disetujuinya *Composition Plan* Purinusa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2005.

Susunan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Anak perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Aktiva (A\$)
Lontar Papyrus Finance B.V.	100	43.602
Grant Ventures Limited	100	42.915

4. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Company

Anak Perusahaan yang Mayoritas atau 100% Dimiliki

Nama Perusahaan	% Kepemilikan
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	80,00
Pindo Deli Finance B.V.	100,00
PT Karawang Ekawarna Nugraha (KEN)	98,90
Excel International Limited	100,00
Pindo Deli Finance Mauritius Limited	100,00
Grant Ventures Limited	80,00
Lontar Papyrus Finance B.V.	80,00
PT Persada Kharisma Perdana	99,99
PT Parvatakencana Asri	99,99
PT Paramacipta Intinusa	99,99
PT Sentra Karyamas Serasi	99,99
PT Pravesa Grahamas	99,99
PT Persadanusa Makmurindo	99,99
PT Sejatibuana Jayadharma	99,99
PT Karyamas Primalestari	99,99
PT Primakarya Timurmas	99,99

3.4. Kegiatan CSR Perusahaan

Sinar Mas Pulp & Paper Products ("APP") yang terdiri dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk., PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, dan PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Company berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

APP memiliki visi untuk menjadi perusahaan produsen kertas, bubur kertas (*pulp*) dan tissue nomor satu di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21, berdedikasi memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut, APP berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. APP mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktik kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2006, APP dan para pemasok bahan baku kayu ("Pemasok") yang beroperasi di bawah naungan Sinar Mas Forestry ("SMF"), berhasil melakukan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan hutan tanaman secara lestari, konservasi lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat sekitar.

Perlindungan Lingkungan

Dalam menjalankan operasionalnya, APP telah memenuhi persyaratan dan peraturan terkait pemenuhan bahan baku, lingkungan, kesehatan dan keselamatan

kerja. Persyaratan dan peraturan tersebut telah diterapkan sebagai kebijakan operasional yang senantiasa dimonitor oleh APP.

Pada tahun 1998, APP memperoleh sertifikat ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari DNV dan selanjutnya APP telah memperbaharui sertifikat tersebut dari versi ISO 14001 menjadi ISO 14001:2004 dari SGS yang merupakan standar Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terbaru. Guna meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan, APP menunjuk Hatfindo, anak perusahaan Hatfield Consultants Ltd. (Vancouver, BC) sejak akhir tahun 2005 hingga triwulan pertama tahun 2006. Disamping itu, APP juga telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3).

APP juga menjalankan program “tiga R” yang merupakan *good resource stewardship – reduce, reuse, recycle* – dan mengintegrasikannya dalam operasional Sistem Manajemen Lingkungan.

APP melaksanakan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan, termasuk Kebijakan Pengendalian Sumberdaya dan Kebijakan ‘Reduce, Reuse, Recycle’. Dalam sistem pengolahan air limbah, APP menggunakan sistem endapan (*sludge*) aktif dengan perlakuan fiskal dan kimiawi tertentu untuk membuat air limbah dapat dialirkan secara aman ke saluran air.

Produk-produk APP telah memenuhi peraturan keamanan produk sesuai permintaan pasar di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat khususnya terhadap peraturan larangan penggunaan zat-zat berbahaya.

Pada akhir tahun 2006, APP dianugerahi *European NF Eco-Mark* untuk kategori produk berkualitas. Audit sertifikasi tersebut dilakukan oleh AFAQ

AFNOR dari Perancis. APP merupakan pabrik kertas pertama di Indonesia yang menggunakan sertifikasi Ekolabel Indonesia bagi produk tersebut.

Sistem Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung jawab

Semua bahan baku yang digunakan APP memiliki dokumentasi yang menjamin bahan baku berasal dari sumber yang dapat dilacak. APP menggunakan sistem lacak balak (*Chain of Custody/CoC*) guna memastikan tidak ada bahan baku ilegal masuk di dalam rantai pasokan. Penggunaan sistem ini setiap tahun diverifikasi secara independen.

Sebagian besar *pulp* yang dikonsumsi oleh APP diproduksi oleh pabrik *pulp* APP di Sumatra. Audit verifikasi oleh pihak independen terhadap sumber bahan baku APP dilakukan oleh SGS (*Societe Generale de Surveillance*), yang menyimpulkan tidak ada bahan baku ilegal dari para Pemasok. Untuk pembelian *pulp* dari pihak luar, APP hanya membeli *pulp* yang telah mendapat sertifikasi lingkungan.

Sejak Oktober 2006, seluruh pabrik APP telah mengimplementasikan kriteria *Green Purchasing Law (GPL)* Jepang dalam proses produksi *pulp* dan kertas. *GPL* dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para pelanggan mengenai legalitas dan kesinambungan pasokan bahan baku atas produk yang dijual ke pasar Jepang. Dalam hal ini, *GPL* Jepang menggunakan sistem sertifikasi pasokan kayu yang tak terputus, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi hingga produk sampai ke tangan pelanggan.

Tanggung jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan APP telah mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga menjadi lebih mandiri dengan menciptakan berbagai peluang melalui penyediaan jasa pendukung dan program-program yang dibutuhkan, meliputi pendidikan, pelatihan ketrampilan, berbagai program pemberdayaan masyarakat, fasilitas kesehatan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur.

Program-program sehubungan dengan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan APP antara lain adalah:

a) Pendidikan

Salah satu prioritas utama kegiatan sosial APP adalah memberikan bantuan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. APP memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, perbaikan infrastruktur pendukung sekolah, memberikan bantuan buku sekolah, tas sekolah dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Pada bulan Maret 2007 APP bersama dengan perusahaan lainnya yang tergabung dalam Sinar Mas Pulp & Paper Product bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation membagikan buku tulis sejumlah satu juta unit kepada 100.000 siswa korban banjir dari 250 Sekolah Dasar Negeri di Jakarta.

APP juga mengadakan program “Tjiwi Kimia Peduli Pendidikan” di mana program ini selain memberikan bantuan dalam hal infrastruktur dan material juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang dilakukan dengan memberikan pelajaran tambahan oleh sukarelawan kepada siswa-siswa sekitar pabrik.

b) Pelatihan Keterampilan

APP mengadakan pelatihan kepada masyarakat sekitar berupa ketrampilan dan praktik-praktik kerja melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Perseroan.

c) Program Pemberdayaan

APP memberikan kesempatan dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan kerja sama dengan koperasi; dan *outsourcing* serta membina dan kerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah setempat yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka sekaligus untuk memenuhi kebutuhan APP. Dengan demikian, usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari kegiatan APP secara keseluruhan.

d) Pelayanan Kesehatan

APP sangat peduli akan kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti klinik yang menyediakan fasilitas layanan serta gawat darurat bagi karyawan dan keluarganya yang tinggal di daerah tersebut. APP juga menyediakan layanan medis untuk desa-desa yang terpencil. Disamping itu APP turut serta dalam usaha penanggulangan AIDS di Indonesia, dan atas partisipasinya tersebut APP memperoleh AIDS Awards yang diberikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS.

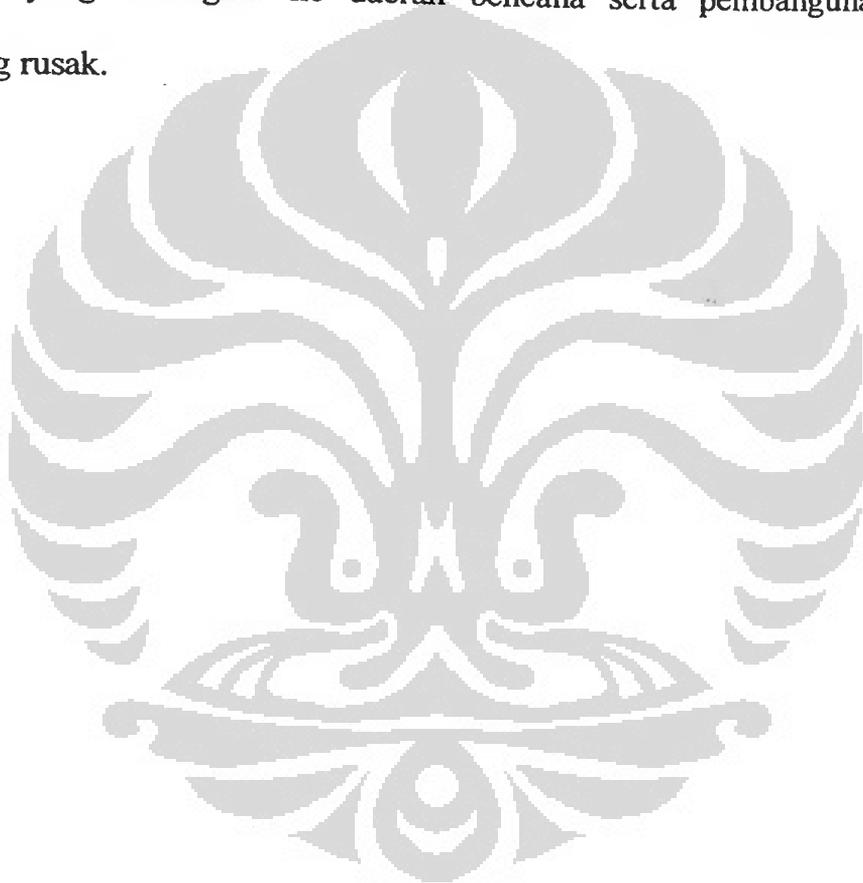
e) Perbaikan Infrastruktur

APP turut serta membiayai berbagai proyek perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan daerah setempat. Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif dan perbaikan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f) Bantuan kepada Korban Gempa Bumi Di Yogyakarta dan Jawa Tengah

APP bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, bantuan diberikan dalam bentuk paket bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, sumbangan dan sukarelawan yang berangkat ke daerah bencana serta pembangunan kembali sekolah yang rusak.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Laporan Ideal Menurut GRI

Bab ini akan membahas mengenai bentuk dan sistematika pelaporan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dari Asia Pulp and Paper (APP) yang selanjutnya akan disebut dengan perusahaan yang terdiri dari empat perusahaan antara lain PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang beroperasi di Perawang, Serang dan Tangerang; PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang beroperasi di Sidoarjo; PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills yang beroperasi di Karawang; dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang beroperasi di Tebing Tinggi, dimana laporan CSR perusahaan ini akan dihubungkan dengan suatu bentuk pelaporan yang ideal menurut panduan yang diberikan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI) tahun 2006 versi 3.0.

Pada dasarnya perusahaan telah membuat laporan tersendiri mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini diwujudkan dalam *sustainability report* yang dikeluarkan untuk pertama kalinya di tahun 2006, dimana isi dari laporan tersebut adalah kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan selama dua tahun (2005-2006).

Dalam menganalisis, akan dilihat apakah *sustainability report* dari perusahaan telah memenuhi lima komponen utama dalam GRI yaitu strategi dan analisis; profil organisasi; parameter laporan; penyelenggaraan, komitmen, dan keterlibatan; dan pendekatan manajemen dan indikator ekonomi, serta dilihat apakah isi dari setiap komponen yang dilaporkan telah sesuai dengan panduan yang ada pada *Global Reporting*

Initiatives (GRI) versi 3. Penulis menggunakan pembobotan antara 1(rendah) dan 3(tinggi). Dan pembobotan ini diberikan berdasarkan *judgement* dari penulis.

4.2. Analisis Komponen Pelaporan Menurut GRI

4.2.1 Strategi dan Analisis

Menurut panduan GRI 2006, strategi dan analisis terdiri dari:

- Sepatah kata dari CEO
- Dampak utama, risiko, peluang utama

Di dalam *sustainability report* perusahaan terdapat sepatah kata dari CEO yakni Teguh Ganda Wijaya yang intinya adalah bagaimana perusahaan berusaha untuk mempertahankan komitmennya yaitu "*Conservation beyond compliance*" dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan, dan sekaligus memuat dampak utama, risiko, dan peluang utama perusahaan. Pada bagian ini tertulis bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat terus meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan kertas yang akan naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan perusahaan juga memberikan dampak positif yaitu mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik sehingga menjadi lebih mandiri dengan menciptakan berbagai peluang melalui penyediaan jasa pendukung dan program-program yang dibutuhkan, meliputi pendidikan, pelatihan ketrampilan, berbagai program pemberdayaan masyarakat, fasilitas kesehatan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur.

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing komponen yang terdapat dalam strategi dan analisis mendapatkan bobot 3, karena telah diungkapkan secara lengkap dan jelas di dalam *sustainability report* perusahaan.

4.2.2 Profil Organisasi

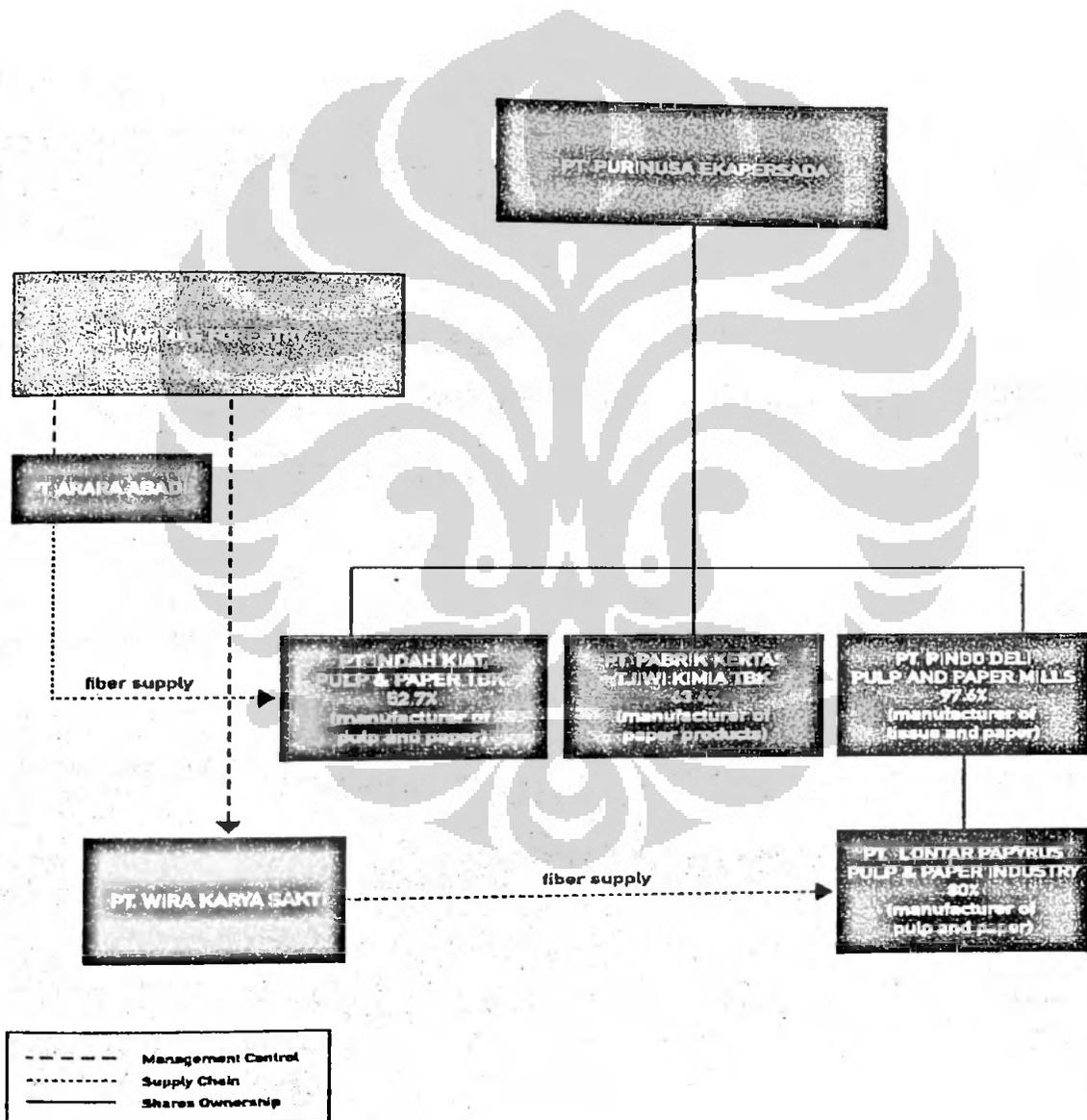
Menurut panduan GRI 2006, profil organisasi terdiri dari:

- Nama organisasi
- Merk, jasa utama
- Struktur operasional
- Lokasi kantor pusat
- Negara-negara tempat operasi
- Bentuk badan hukum
- Pasar yang dilayani
- Skala organisasi
- Perubahan signifikan
- Penghargaan yang diperoleh

Nama organisasi dijelaskan dalam pendahuluan perusahaan yang terdapat pada *sustainability report*. Pada bagian ini disebutkan bahwa perusahaan terdiri dari empat perusahaan antara lain PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang beroperasi di Perawang, Serang dan Tangerang; PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang beroperasi di Sidoarjo; PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills yang beroperasi di Karawang; dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang beroperasi di

Tebing Tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga disebutkan bahwa merk dan jasa utama dari perusahaan adalah memproduksi bubur kertas (*pulp*), berbagai jenis produk kertas seperti untuk keperluan tulis dan cetak, kertas fotokopi, kertas industri, kertas berwarna, *tissue*, dan *art paper*.

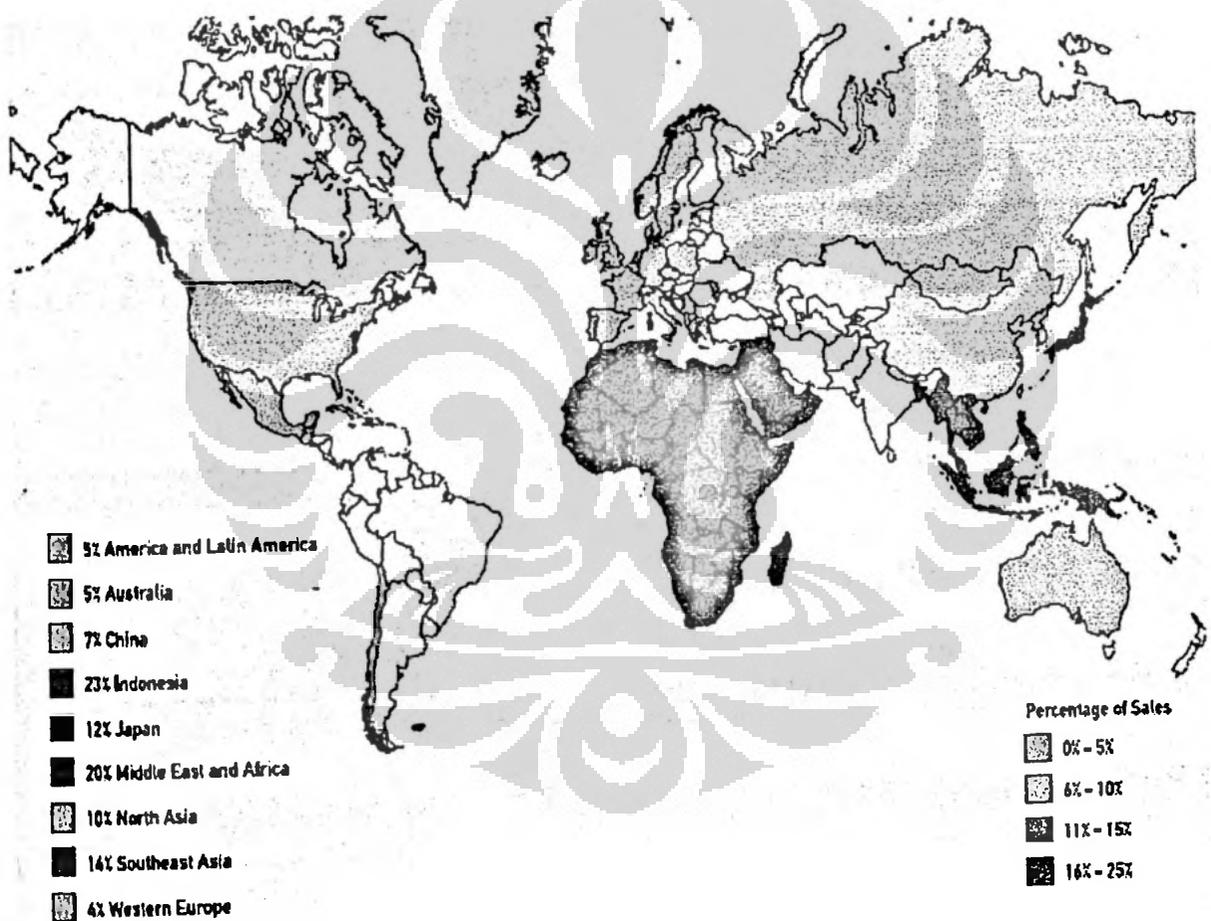
Struktur operasional perusahaan seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* adalah sebagai berikut:



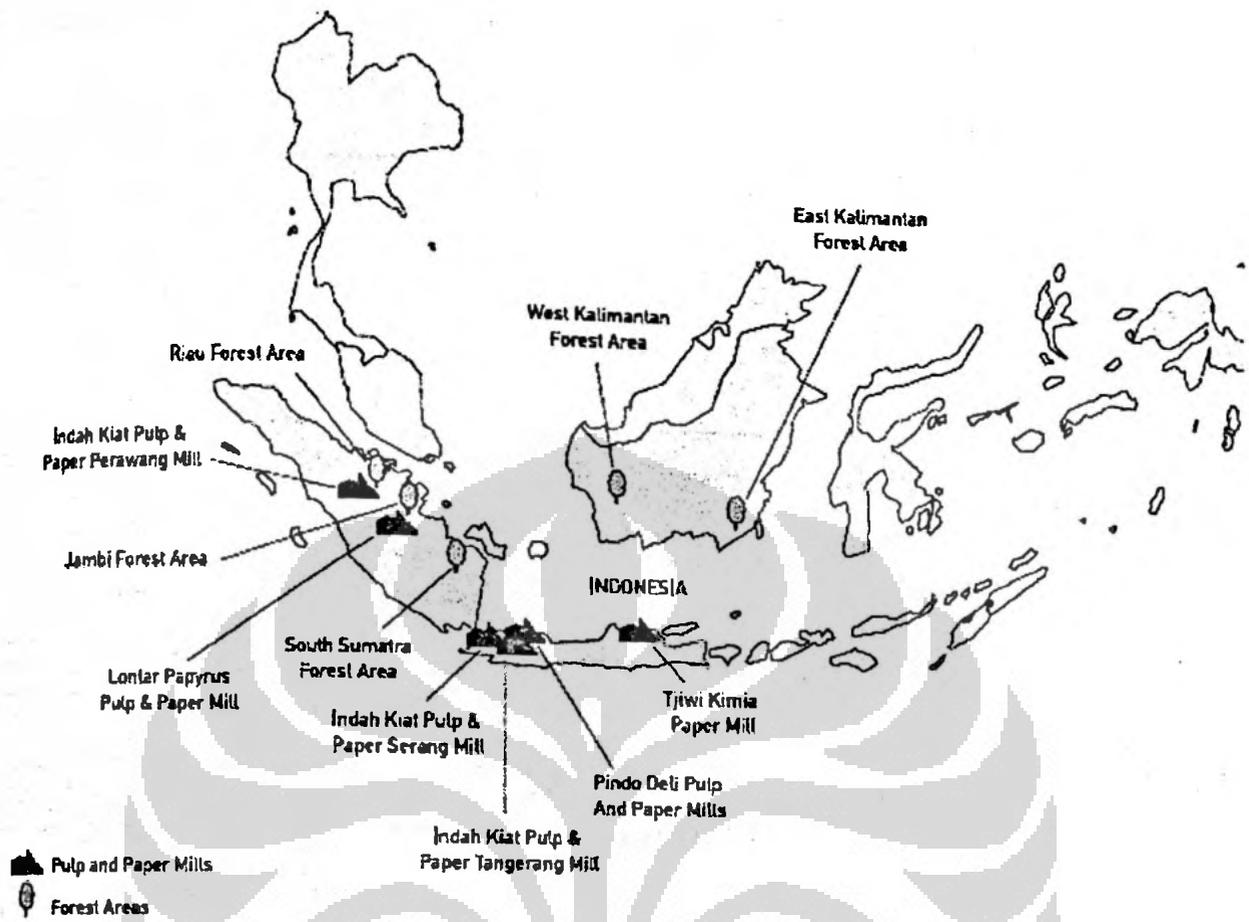
Untuk lokasi kantor pusat, perusahaan tidak mencantulkannya di *sustainability report*.

Negara-negara tempat perusahaan beroperasi seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* adalah perusahaan melakukan kegiatan operasinya di lebih dari 65 negara seperti Eropa, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia. Berikut adalah ilustrasinya:

DISTRIBUTION OF APP PRODUCTS SALES 2005



APP PRODUCTION FACILITIES



Bentuk badan hukum perusahaan tidak dijelaskan dalam *sustainability report*.

Skala organisasi perusahaan yang dimaksud disini adalah jumlah karyawan, penjualan bersih atau pendapatan bersih dan total kapitalisasi ekuitas. Berikut adalah skala organisasinya seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report*:

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

a) Perawang

2005 MILL PROFILE

Total Production (Tons)

Pulp	1,900,000
Tissue	0
Paper	600,000
Paper Machines	3
Total Revenues (US \$ Millions)	850

Employment

Direct Jobs	8,000
Indirect Jobs	7,000

b) Serang

2005 MILL PROFILE

Total Production (Tons)

Linerboard/Medium	700,000
Coated Box Board	400,000
Corrugated Carton Box	160,000
Paper Machines	4
Total Revenues (US \$ Millions)	500

Employment

Direct Jobs	5,000
Indirect Jobs	1,100

c) Tangerang

2005 MILL PROFILE

Total Production Capacity (Tons)

Paper	100,000
Paper Machines	3
Total Revenues (US \$ Millions)	50

Employment

Direct Jobs	1,200
Indirect Jobs	250

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

2005 MILL PROFILE

Total Production [Tons]

Paper	1,120,000
Paper Machines	12
Total Revenues [US \$ Millions]	927
Employment	
Direct Jobs	13,500
Indirect Jobs	3,800

3. PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills

2005 MILL PROFILE

Total Production Capacity
[Tons. Q1, 2006]

Tissue	72,000
Paper	913,000
Packaging	96,000
Paper Machines	12
Total Revenues [US \$ Millions]	920
Employment	
Direct Jobs	7,150
Indirect Jobs	2,500

4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

2005 MILL PROFILE

Total Production [Tons]

Pulp	652,000
Tissue	51,000
Paper	7,000
Paper Machines	2
Total Revenues [US \$ Millions]	290
Employment	
Direct Jobs	2,000
Indirect Jobs	600

Perubahan signifikan yang terjadi di dalam perusahaan selama periode pelaporan dapat dinyatakan dengan adanya perubahan struktur, kepemilikan, atau ukuran. Seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report*, bahwa perusahaan memiliki perubahan signifikan sebagai berikut:

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

a) Perawang

Pada pertengahan tahun 2006, Indah Kiat Perawang memiliki kemampuan memproduksi *pulp* sebagai *elemental chlorine free (ECF) pulp* hingga mencapai 90%.

b) Serang

Indah Kiat Serang memiliki *co-generation plant, an incinerator* dan dua buah *wastewater-treatment plants*.

c) Tangerang

Indah Kiat Tangerang memiliki *co-generation plant* dan *a wastewater-treatment plant*.

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Tjiwi Kimia memiliki *co-generation plant, an incinerator, a chemical plant* (memproduksi *caustic soda* dan berbagai jenis produk *chlorine* dan *hypochlorite*), *a de-inking plant, a corrugated box plant, a pallet factory* dan *water treatment plants*.

3. PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills

Pindo Deli memiliki *co-generation plant, wastewater-treatment plants, a de-inking facility, calcium carbonate plant, a pallet factory, a corrugated box plant dan a caustic soda plant.*

4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Lontar Papyrus memiliki dua buah fasilitas *co-generation plant* yang menggunakan *biomass* sebagai bahan bakar, *wastewater-treatment plants* dan a *caustic soda plant.*

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* adalah sebagai berikut:

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

a) Perawang

- Tahun 1995, ISO 9001 *quality management system certification from DNV Certification*
- ISO 14001 *environmental management system by DNV*
- ISO *Environmental Management System (EMS)*
- ISO 9706 *Standard for Permanent Paper*
- Tahun 1999, *government's SMK3 certification*

b) Serang

- Tahun 1995, ISO 9001 *quality management system certification by SGS*
- ISO 14001 *certification*
- ISO *Environmental Management System (EMS)*
- Tahun 2001, *government's SMK3 certification*

c) Tangerang

- Tahun 1995, ISO 9001 *quality management system certification by SGS*
- ISO 14001 *environmental management system standards*
- ISO *Environmental Management System (EMS)*
- Tahun 1998, *government's SMK3 certification*

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

- Tahun 1995, ISO 9001 *quality management system certification by DNV*
- Tahun 1998, ISO 14001 *environmental management system (EMS) certification by DNV*
- Pertengahan tahun 2006, *Indonesian Ecolabel in the Uncoated Printing Paper Product Category*
- Tahun 2003, *Ecomark certificate from the Japan Environment Association*
- Tahun 2006, *government's SMK3 certification*

3. PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills

- Tahun 1996, ISO 9001 *quality management system certification by SGS*
- Tahun 1999, ISO 14001 *environmental management system (EMS) certification by SGS*
- Tahun 2004 dan 2005, *US Food and Drug Administration Regulations certification*
- Tahun 2006, *Indonesian Ecolabel in the Uncoated Printing Paper Product Category*
- ISO 9706 *Standard for Permanent Paper*
- *Government's SMK3 certification*

4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

- Tahun 1995, ISO 9001 *quality management system certification by SGS*
- Tahun 1997, ISO 14001 *environmental management system (EMS) certification by SGS*
- Tahun 2006, *European Union Ecolabel certification*
- Januari 1998, *Government's SMK3 certification*
- Juli 2005, *a Green Environmental Cup and Certificate for excellence in performance under the Ministry of Environment's PROPER*

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar komponen yang ada dalam profil organisasi telah diungkapkan dalam *sustainability reporting* perusahaan yaitu dari 10 komponen yang harus diungkapkan perusahaan telah mengungkapkan 8 komponen. Sehingga bobot yang dapat diberikan adalah 3.

4.2.3 Parameter Laporan

Menurut panduan GRI 2006, parameter laporan terdiri dari:

- Periode pelaporan
- Laporan sebelumnya
- Siklus pelaporan
- Titik kontak
- Menentukan isi laporan
- Batas laporan
- Batas lingkup laporan
- Dasar pelaporan

- Ukuran, Perhitungan
- Uraian
- Perubahan dibandingkan laporan sebelumnya
- Pengungkapan dalam laporan
- Praktik jaminan

Pada *sustainability report* perusahaan disebutkan bahwa periode laporan adalah dua tahun yaitu dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 desember 2006 dan laporan ini adalah untuk yang pertama kalinya dibuat oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan membuat *sustainability report* nya langsung untuk dua tahun, jadi tidak terdapat laporan sebelumnya.

Untuk titik kontak, tidak ada disebutkan dalam *sustainability report* perusahaan.

Isi laporan termasuk didalamnya adalah menyajikan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan sesuai yang disyaratkan dalam indikator GRI dan juga sesuai dengan parameter utama yang relevan dengan kegiatan perusahaan. Selain itu juga disebutkan *stakeholder* yang menggunakan laporan ini seperti *supplier, local authority, community leader* baik yang *official* maupun *unofficial*, NGO dan *fish-farmer-relocated settler*.

Untuk batas dan lingkup laporan seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan adalah bahwa perusahaan menekankan pada pelaporan kegiatan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan yang disyaratkan oleh GRI. Dan termasuk didalamnya adalah kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.

Dasar pelaporan dari *sustainability report* perusahaan adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Global Reporting Initiative (GRI) framework*, yang merupakan standar internasional untuk penyusunan *sustainability report*.

Ukuran dan perhitungan dapat dilihat dalam setiap bagian yang disajikan dalam *sustainability report* perusahaan, seperti adanya perhitungan *The Severity Index*, *The Frequency Index*, pendapatan, jumlah produksi, dan lain-lain.

Penjelasan atau uraian yang terdapat dalam *sustainability report* perusahaan adalah mengenai *nature of business*-nya yaitu memproduksi berbagai jenis produk kertas, seperti *art and specialty papers*, *tissue* dan *paperboard*. Dan sebagai tambahan perusahaan juga memproduksi *converted paper products* seperti kertas fotokopi, perlengkapan kantor, *hygienic tissue*, dan kertas kemasan. Selain itu, tidak terdapat perubahan atas *sustainability report* perusahaan dibandingkan dengan laporan sebelumnya karena laporan ini adalah untuk yang pertama kalinya diterbitkan oleh perusahaan.

Pengungkapan dalam laporan merupakan tabel penunjuk lokasi standar yang digunakan untuk membuat laporan. Tabel ini berisi komponen-komponen yang ada dalam GRI yang dibandingkan dengan isi laporan dari perusahaan, tetapi tabel ini tidak terdapat dalam *sustainability report* perusahaan.

Praktik jaminan juga dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah disebutkan dalam *sustainability report* yaitu bahwa perusahaan menggunakan perusahaan jasa profesional independen *Bureau Veritas* untuk menjamin kualitas, kesehatan, keamanan, sosial dan lingkungan manajemen perusahaan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk komponen-komponen dalam hal parameter laporan, perusahaan telah mengungkapkannya dalam *sustainability report* dengan jelas. Kalaupun ada yang tidak diungkapkan adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan pelaporan sebelumnya sementara laporan ini adalah laporan perusahaan untuk yang pertama kali dan juga indeks isi GRI yang dapat membantu para pemakai laporan dalam membaca *sustainability report* perusahaan. Jadi bobot yang dapat diberikan adalah 3 (9 dari 13 komponen telah diungkapkan).

4.2.4 Penyelenggaraan, Komitmen, dan Keterlibatan

Menurut panduan GRI 2006, penyelenggaraan, komitmen, dan keterlibatan terdiri dari:

- Struktur dan komite
- Pemisahan Chair/CEO
- Anggota independen
- Mekanisme pemegang saham dan karyawan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen
- Hubungan antara kompensasi dan kinerja
- Konflik kepentingan
- Kualifikasi dewan
- Nilai-nilai yang relevan dengan sosial, lingkungan, dan ekonomi
- Prosedur pemantauan kinerja
- Proses evaluasi dewan direksi

- Pendekatan kesiagaan
- Ketangguhan prinsip
- Keanggotaan
- *Stakeholder* yang terlibat
- Mengidentifikasi *stakeholder*
- Keterlibatan *stakeholder*
- Hasil keterlibatan *stakeholder*

Untuk struktur dan komite, pemisahan Chair/CEO, dan anggota independen seperti yang telah disajikan dalam *sustainability report* perusahaan ditunjukkan dengan struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Komisaris

Presiden Komisaris	: Yudi Setiawan Lin
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris	: Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Show Chung Ho
Komisaris	: Kuo Cheng Shyong
Komisaris	: Lo Shang Shung
Komisaris Independen	: Mas Achmad Daniri
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	: Drs. Kamardy Arief
Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman

Direksi

Presiden Direktur	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Suresh Kilam
Wakil Presiden Direktur	: Lin Shun Keng
Wakil Presiden Direktur	: Chen Wang Chi
Direktur	: Didi Harsa
Direktur	: Raymond Liu, Ph.D
Direktur	: Ir. Buyung Wahab, MM
Direktur	: Baharudin
Direktur/ Sekretaris Perusahaan	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja

Komite Audit

Ketua	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Anggota	: Drs. Rusli Prakarsa
Anggota	: Drs. Pande Putu Raka, MA

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Komisaris

Presiden Komisaris	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris	: Drs. John Ferdinand Pandelaki
Komisaris	: Arthur Tahya
Komisaris	: Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra

Komisaris Independen	: Let. Jen. TNI (Pur) Soetodjo
Direksi	
Presiden Direktur	: Yudi Setiawan Lin
Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Direktur	: Lu Ho-Chang
Direktur	: Suresh Kilam
Direktur	: Raymond Liu, Ph.D
Direktur	: Ir. Buyung Wahab M.M.
Direktur/ Sekretaris Perusahaan	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Komite Audit	
Ketua	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Anggota	: Drs. Rusli Prakarsa
Anggota	: Drs. Pande Putu Raka, MA
3. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills	
Komisaris	
Komisaris Utama	: Teguh Ganda Wijaya
Komisaris	: Yudi Setiawan Lin
Komisaris	: Arthur Tahya
Komisaris	: Drs. John F. Pandelaki
Komisaris Independen	: Letjen. TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA

Direksi

Direktur Utama : Tsai Huan Chi
Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Wakil Direktur Utama : Suresh Kilam
Direktur : Suhendra Wiriadinata
Direktur : Huang Hua Ching

Komite Audit

Ketua : Prof. Pande Putu Raka, MA
Anggota : Drs. Kamardy Arief
Anggota : Hotbonar Sinaga, SE

4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry**Komisaris**

Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya
Wakil Komisaris Utama : John Ferdinand Pandelaki
Komisaris : Sukirta Mangkudjaja
Komisaris Independen : Letjen. TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen : Hajjah Ryani Soedirman
Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA

Direksi

Direktur Utama : Lin Fu Li
Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Direktur : Suresh Kilam
Direktur : Lin Shun Keng

Direktur : Ir. Buyung Wahab, MM

Direktur : Arthur Tahya

Komite Audit

Ketua : Prof. Pande Putu Raka, MA

Anggota : Drs. Kamardy Arief

Anggota : Hotbonar Sinaga, SE

Mekanisme untuk rekomendasi kepada manajemen, hubungan antara kompensasi dan kinerja, dan kualifikasi dewan tidak dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan.

Mengenai konflik kepentingan, seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan bahwa perusahaan memiliki semboyan yang sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Eka" , sehingga dimungkinkan konflik kepentingan akan diusahakan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi keberlanjutan perusahaan.

Nilai-nilai sosial, lingkungan dan ekonomi yang dapat diberikan oleh perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* adalah bahwa perusahaan selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan dengan cara menerapkan praktik kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Mengenai prosedur pemantauan kinerja dan proses evaluasi dewan direksi tidak dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan.

Pendekatan kesiagaan juga telah dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* bahwa perusahaan telah menjalankan program-program sehubungan dengan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan, pelayanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur. Selain itu terdapat program perlindungan lingkungan, sistem pemasokan bahan baku yang bertanggung jawab, program konservasi dan *flagship conservation*.

Ketangguhan prinsip perusahaan juga dijelaskan dalam *sustainability report*. Perusahaan memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu “*Conservation beyond compliance*”, dimana tiga kata ini mengungkapkan komitmen perusahaan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan baik itu di lingkungan maupun komunitas dimana perusahaan berdiri. Selain itu, dalam kebijakan dan praktik, perusahaan juga berkomitmen untuk patuh terhadap standar-standar hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengenai keanggotaan perusahaan seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* yaitu perusahaan menjadi anggota organisasi non-profit internasional *Rainforest Alliance* (RA) dimana organisasi ini tugasnya memonitor daerah hutan di Sumatera yang diidentifikasi sebagai *High Conservation Value Forest* (HCVF).

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* adalah seluruh pelanggan di seluruh dunia, pemasok, pemimpin dan anggota dari suatu komunitas, organisasi non-

pemerintahan, pihak-pihak berwenang baik lokal maupun regional, pemerintahan RI dan media.

Mengidentifikasi *stakeholder* juga dilakukan oleh perusahaan. Dalam *sustainability report* disebutkan nama, jabatan, dan lokasi tempat dari *stakeholder* tersebut dan juga dijelaskan mengenai hubungan keterlibatannya dengan perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

STAKEHOLDERS SURVEYED FOR THIS REPORT

Daniel Sunotoredjo	Sales Manager, Amazon Papyrus Chemicals	Supplier	Pindo Deli
Asikin Hono	Sales Manager, PT Eka Chemicals Indonesia	Supplier	Pindo Deli
Mr Omon Sumantri	Formal Village Leader of Kutapohaci	Local Authority	Kutamekar Village Pindo Deli
Mrs. Yayat Rahayu	Formal Village Leader of Kutapohaci	Local Authority	Kutapohaci Village Pindo Deli
Mr. M. Soleh	Leader of Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Organization)	Community Leader	Kutamekar Village Pindo Deli
Mr. Ade Rasmadi	Leader of Farmers Group	Community Leader	Kutapohaci Village Pindo Deli
Mr. Wawan	Youth Leader	Community Leader (official)	Kampung Baru Utara Village Indah Kiat, Tangerang
Mr Rusdi Mr Sukarta		Community Leaders (official)	Kampung Baru Selatan Village Indah Kiat, Tangerang
Mr Drs Muhdini	Youth Leader	Community Leader (official)	Kampung Wates Jaya Village Indah Kiat, Tangerang
Mr H. Suhardjo	Religious Leader	Community Leader (unofficial)	Kampung Wates Jaya Village Indah Kiat, Tangerang
Mr Arsid	Head of Serpong Subdistrict	Local Authority	Indah Kiat, Tangerang

STAKEHOLDERS SURVEYED FOR THIS REPORT

Ms. Nani Suparni	Head of Pakulonan Subdistrict	Local Authority	Indah Kiat, Tangerang
Mr. Decky Saprudin Bsc	Member of Regional Representative of Tangerang Regency	Local Authority	Indah Kiat, Tangerang
Mr. Zulkifli	Official Secretary of Tualang Subdistrict	Local Authority	Tualang Subdistrict Indah Kiat, Perawang
Mr. Mukhtar M.		Community Leader (official)	Pinang Sebatang Village Perawang, Riau Indah Kiat, Perawang
Mr. Maasri	Leader of "Bunut Abadi" Cooperation	Community Leader	Pinang Sebatang Village, Riau Riau Forest
Mangara Silalahi	Leader, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM—Community Forestry Communication Forum)	NGO	Riau Forest
Mr. Ahmad Syah	Tokoh Masyarakat	Community Leader (unofficial)	Tebing Tinggi Village, Jambi Lontar Papyrus
Mr. Ishak	None	Fish farmer—relocated settler	Tebing Tinggi Village, Jambi Lontar Papyrus
Mr. Pahrin E. Siregar	Executive Director Yayasan Citra Bina Mandiri (Citra Bina Mandiri Foundation)	NGO	Telanai Pura, Jambi Jambi Forest
Mr. M Sholeh	Tokoh Masyarakat	Community Leader (unofficial)	Kelagian Baru, Tebing Tinggi Village Jambi Forest
Mr. Sudirman	Tokoh Masyarakat	Community Leader (unofficial)	Kramat Temenggung Village, Sidoarjo, East Java TjiwiKimia
Mr. Entus Mahmud	Head of Kragilan Subdistrict	Local Authority	Kragilan Village, Serang Indah Kiat, Serang
Mr. Endang Ariesta	Leader of FORKLIP (Forum Komunikasi Lintas Industri dan Pemuda; communication forum for intra-industrial and the youth)	Community Leader	Kragilan Village, Serang Indah Kiat, Serang
Paulus Ridwan Mulyana	Unknown, PT BASF Indonesia	Supplier	Tjiwi Kimia
Budiono, Ir.	Head of environmental Impact Control Environmental Department, Mining and Energy	Local Authority	Tjiwi Kimia

Keterlibatan *stakeholder* juga terlihat dalam *sustainability report*, dimana perusahaan menjalin suatu komunikasi terbuka dengan pemerintah baik itu nasional, lokal maupun regional dan juga bekerjasama dengan mereka dalam menjamin efektifitas dari implementasi kebijakan dan program-program pemerintah. Dan juga melakukan diskusi dengan para *stakeholder* mengenai isu-isu apa yang akan berdampak terhadap pabrik, operasi hutan, dan kelompok *stakeholders* lainnya yang relevan dengan perusahaan.

Hasil dari keterlibatan *stakeholder* yang dijelaskan dalam *sustainability report* adalah adanya laporan dari para *stakeholder* baik secara mingguan ataupun bulanan dan juga terdapat “APP *Stakeholder Update*” yang dilakukan secara periodik dan dokumen ini akan didistribusikan kepada *stakeholder* yang jumlahnya lebih dari 600 orang. Selain itu ada juga “*Sustainability Events*” yang menjadi forum bagi perusahaan dengan *stakeholder*-nya dalam bertukar pikiran atau diskusi.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk komponen-komponen yang ada dalam bagian penyelenggaraan, komitmen dan keterlibatan telah diungkapkan dengan baik dalam *sustainability report* perusahaan, karena hampir seluruhnya telah dijelaskan oleh perusahaan dalam laporannya. Sehingga dapat diberikan bobot 3 karena 12 dari 17 komponen yang ada telah diungkapkan oleh perusahaan dalam *sustainability report*.

4.2.5 Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja

Menurut panduan GRI 2006, dalam setiap indikator kinerja terdapat pengungkapan tentang pendekatan manajemen. Indikator kinerja tersebut terdiri dari:

- Indikator kinerja ekonomi
- Indikator kinerja lingkungan
- Indikator kinerja masyarakat
- Indikator kinerja praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak
- Indikator kinerja hak asasi manusia

Indikator kinerja ekonomi memiliki beberapa aspek antara lain: aspek kinerja ekonomi (hasil nilai ekonomi, risiko keuangan akibat perubahan iklim, cakupan program tunjangan, dan bantuan keuangan dari pemerintah); aspek keberadaan pasar (rasio-rasio upah awal, pemakaian pemasok lokal, dan prosedur untuk seleksi tenaga kerja lokal); dan aspek dampak ekonomi tidak langsung (dampak investasi lokal dan dampak ekonomi tidak langsung).

Untuk aspek kinerja ekonomi, hasil nilai ekonomi ditunjukkan dalam *sustainability report* perusahaan adalah sebagai berikut:

APP MILL SALES {US \$ Thousands}

MILL	2005 SALES
Indah Kiat	1,414,148
Pindo Deli	920,349
Tjiwi Kimia	926,447
Total	3,260,944

Selain itu, hasil nilai ekonomi perusahaan juga dapat dilihat dari sumbangan-sumbangan yang diberikan perusahaan berupa bantuan untuk: (1) pendidikan dalam bentuk beasiswa, perbaikan infrastruktur sekolah, buku sekolah, tas sekolah, dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya; (2) pelatihan kepada masyarakat berupa keterampilan dan praktik-praktik kerja melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Perseroan; (3) program pemberdayaan berupa bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah; (4) pelayanan kesehatan dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti klinik; dan (5) perbaikan infrastruktur dengan membiayai berbagai proyek perbaikan infrastruktur. Mengenai risiko keuangan akibat perubahan iklim, cakupan program tunjangan dan bantuan keuangan dari pemerintah tidak terdapat dalam *sustainability report* perusahaan.

Untuk aspek keberadaan pasar, di dalam *sustainability report* dijelaskan bahwa perusahaan memiliki pemasok eksklusif yaitu *Sinarmas Forestry*. Dan perusahaan juga mempunyai kebijakan dalam menyeleksi para pemasoknya. Berikut adalah isi dari kebijakannya:

Fiber Procurement Policy

APP is committed to purchasing wood fiber for pulp-making operations from sustainably managed forestry sources, which conserve areas of outstanding habitat and operate in harmony with local communities. To implement this commitment, APP will:

- Ensure that wood suppliers maintain compliance with all relevant regional, national and international regulations for sustainable forestry and land-use management;
- Ensure that a multi-stage environmental assessment process is conducted prior to plantation development. The environmental assessment process will meet or exceed the standard required by national law;
- Ensure that wood is properly checked and verified as to legal origin and chain of custody before it enters the mill;
- Maintain systems and procedures to reasonably ensure that wood coming from illegal sources shall be rejected before it enters the mill;
- Expect that wood suppliers comply with relevant universal human rights regulations;
- Expect that wood suppliers undertake community relations programs based upon participatory assessment and planning principles, involving all relevant stakeholders;
- Ensure that wood suppliers who are found in breach of relevant legal requirements and the provisions of the policy shall be immediately warned and, for repeated violations, have their contracts terminated.

Mengenai pemakaian tenaga kerja lokal, *sustainability report* memberikan penjelasan sebagai berikut:

2005 NUMBER OF EMPLOYEES
AND INDIRECT JOBS

MILL	EMPLOYEES	INDIRECT JOBS
Indah Kiat Perawang	8,000	7,000
Indah Kiat Serang	5,000	1,100
Indah Kiat Tangerang	1,200	250
Lontar Papyrus	2,000	600
Pindo Deli (1&2)	7,150	2,500
Tjiwi Kimia	13,500	3,800
Total	36,850	15,250

Tetapi tidak dijelaskan mengenai rasio-rasio upah awal.

Aspek dampak ekonomi tidak langsung seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* dapat terlihat terutama terhadap dampak dari investasi lokal seperti pembangunan fasilitas-fasilitas untuk sekolah, fasilitas kesehatan seperti klinik, dan juga membangun tempat beribadah. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsungnya adalah masyarakat di sekitar tempat pabrik berada dapat menyewa tanah dengan harga yang sangat rendah dan ditanami dengan jagung, pisang, melon dan tanaman lainnya yang dapat menambah jumlah penghasilan mereka.

Indikator kinerja lingkungan memiliki beberapa aspek antara lain: aspek bahan (bahan yang digunakan dan pemakaian input daur ulang); aspek energi (energi langsung yang digunakan, energi tidak langsung yang digunakan, penghematan energi, energi produk yang dihemat, dan pengurangan penggunaan energi tidak langsung); aspek air (penggunaan air, sumber air yang terpengaruh, dan pemakaian ulang air); aspek keanekaragaman hayati (lahan keanekaragaman hayati,

dampak terhadap keanekaragaman hayati, pemulihan habitat, strategi keanekaragaman hayati, dan spesies yang dilindungi); aspek emisi, pembuangan & limbah (gas rumah kaca langsung, gas rumah kaca tidak langsung, pengurangan gas rumah kaca, emisi pengurangan ozon, Nox Sox dan lain-lain, pembuangan air, jumlah limbah, tumpahan yang signifikan, limbah berbahaya, dan dampak pembuangan air); aspek produk dan jasa (mengurangi dampak produk dan reklamasi produk terjual); aspek kepatuhan (pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan); dan aspek keseluruhan (pengeluaran untuk perlindungan lingkungan).

Dari aspek bahan, seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* bahwa perusahaan menggunakan bahan baku seperti dibawah ini.

MIX OF FIBER (2005, ALL MILLS COMBINED)



Perusahaan juga mengeluarkan kebijakan manajemen limbah yang mengatur agar input yang digunakan harus dapat di daur ulang ("reduce, reuse, recycle") sehingga dapat mengurangi polutan.

Untuk aspek energi, tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam *sustainability report* perusahaan mengenai energi langsung yang digunakan, energi tidak langsung yang digunakan, penghematan energi, energi produk yang dihemat, dan pengurangan penggunaan energi tidak langsung.

Untuk aspek air seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan, jumlah pemakaian air bersih *per Metric Ton of product produced* yang digunakan di pabrik perusahaan masing-masingnya adalah: Indah Kiat Perawang ($\pm 45.7 \text{ m}^3$); Indah Kiat Serang ($\pm 14.65 \text{ m}^3$); Indah Kiat Tangerang ($\pm 21.3 \text{ m}^3$); Tjiwi Kimia ($\pm 8.27 \text{ m}^3$); Pindo Deli 1 ($\pm 17.8 \text{ m}^3$); Pindo Deli 2 ($\pm 10-11 \text{ m}^3$); Lontar Papyrus ($\pm 40 \text{ m}^3$). Sumber air yang terpengaruh adalah tergantung dimana masing-masing pabrik berdiri, yaitu: sungai Tungkal, Siak, Ciujung, Cisadane, Citarum dan Brantas. Tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai pemakaian ulang air.

Untuk aspek keanekaragaman hayati, di dalam *sustainability report* dijelaskan bahwa lahan yang digunakan adalah 875.000 hektar untuk *High Conservation Value Forest (HCVF) Pilot Project, Tiger Sanctuary* dan Bukit Batu dan Giam Siak Kecil *Biosphere Reserve*. Dampak yang terjadi adalah adanya perlindungan terhadap hutan, satwa seperti harimau dan perlindungan terhadap cagar biosfer seperti di Riau. Dengan begitu maka habitat yang ada akan dapat dilindungi beserta dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Strategi yang digunakan adalah dengan pembelajaran yang dilakukan secara sukarela untuk mengetahui secara spesifik dan rinci tentang ekosistem dan dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen dan terakreditasi sehingga lebih terjamin. Dan pada akhirnya ini akan bermanfaat bagi dunia usaha untuk lebih baik lagi dalam mengelola areal kerjanya serta lebih siap dalam mengidentifikasi dan melindungi habitat serta keanekaragaman hayati didalamnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa spesies yang dilindungi adalah harimau, *eucalyptus*, *acacia mangium* dan *acacia crassicarpa*.

Untuk aspek emisi, pembuangan dan limbah, dalam *sustainability report* perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang seperti yang tercantum dalam daftar "Chemicals Suspected of Having Endocrine Disrupting Effects" yang dikeluarkan oleh Japanese Ministry of the Environment. Selain itu juga produk perusahaan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang (seperti asbestos, AZO content, formaldehyde, phthalates, ozone depleting substances, dll). Dan laporan keamanan produk juga secara berkala diaudit oleh SGS's Singapore Laboratory. Selain itu mengenai kandungan NOx, SOx, jumlah limbah dan tumpahan yang signifikan masing-masing pabrik mempunyai daftarnya sebagai berikut:

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

a) Perawang

AIR EMISSIONS (FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	114.56	98.96	800
NOX (mg/m ³)	74.36	47.41	1,000
Particulate (mg/m ³)	99.99	97.51	230
Opacity (%) ¹	17.89	16.94	35

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	2.82	3.17	8.5
COD (kg/MT)	12.73	13.04	29.25
TSS (kg/MT)	3.10	3.27	8.5
pH	7.27	7.28	6-9
AOX (kg/MT)	0.35	0.36	None

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE		WASH		DRESS & SHIRT	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Incinerate	0%	0%	0%	0%	0%	20%
Compost (fertilizer)	42.60%	51.94%	16.98%	56.47%	0%	0%
Sell	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Landfill	57.40%	48.006%	83.02%	43.53%	100%	79.87%
TF Pulp	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Other	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volume (Tons per Day)	263	116	360	246	264	199

b) Serang

AIR EMISSIONS - POWER PLANT
(FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	17.58	12.36	800
NOX (mg/m ³)	3.45	3.42	1,000
Partikulate (mg/m ³)	17.78	25.02	230
Opacity (%)	9.03	4.12	35

AIR EMISSIONS - INCINERATOR
(FLUE GAS FROM POWER BOILER)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	11.21	9.62	250
NOX (mg/m ³)	33.12	41.95	300
Partikulate (mg/m ³)	2.10	17.18	50
Opacity (%)	4.15	3.80	10

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	0.30	0.22	9.6
COD (kg/MT)	1.84	1.67	25
TSS (kg/MT)	0.53	0.48	59.2
pH	6-8	6-8	6-9

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE		WASTE		URCS & BBI	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Incinerate	0%	0%	100%	100%	0%	0%
Compost (fertilizery)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sell to cement factory	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Landfill	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volume (Tons per Day)	210	210	90	90	76	112

c) Tangerang

AIR EMISSIONS (FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	10.2	29.3	800
NOX (mg/m ³)	20.2	15	1,000
Particulate (mg/m ³)	15.2	14.1	230
Opacity (%)	8.00	6.67	35

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	0.22	0.24	5.0
COD (kg/MT)	1.82	1.48	10.0
TSS (kg/MT)	0.65	0.53	5.0
pH	1.0	6.84	6-9

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE	
	AVERAGE 2005	8 MONTHS 2004
Incinerate	0%	0%
Compost (fertilizer)	0%	Field Pilot
Sell	0%	0%
Landfill	0%	0%
Other-To cement factory.1	100%	100%
Volume (Tons per Day)	120	110

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

AIR EMISSIONS (FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	410.4	53.6	750
NOX (mg/m ³)	25.8	57.4	850
Particulate (mg/m ³)	30.0	12.7	150
Opacity (%)	2.3	NA	20

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	0.23	0.26	5.0
COD (kg/MT)	0.53	0.59	10.0
TSS (kg/MT)	0.13	0.06	5.0
pH	7.04	7	6-9

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE	
	2005	2006
Incinerate (m ³ /month)	0%	Est. 3%
Compost (fertilizer)	0%	0%
Sell	0%	0%
Landfill (m ³ /month)	100%	97%
Other	0%	0%
Total	100%	100%
Volume (Tons./Day)	267	209.5

3. PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mill

AIR EMISSIONS (FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	13.27	10.32	800
NOX (mg/m ³)	7.77	1.66	1,000
Particulate (mg/m ³)	8.17	4.33	230
Opacity (%) ¹	<5	<5	35

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	0.33	0.14	5.0
COD (kg/MT)	1.19	0.3	10.0
TSS (kg/MT)	0.37	0.09	5.0
pH	7.2-7.5	6.7-7.8	6-9

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE	
	2005	8 MONTHS 2006
Incinerate	0%	0%
Compost (fertilizer)	0%	0%
Sell	+/- 5%	0%
Landfill	95%	0%
Other	0%	0%
Total	100%	100%
Volume (Tons per Day)	179	133

4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

AIR EMISSIONS (FLUE GAS FROM POWER BOILERS)

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	90.63	53.01	800
NOX (mg/m ³)	81.00	72.57	1,000
Particulate (mg/m ³)	119.42	169.36	230
Opacity (%) ¹	31	35	40 (max)

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
BOD (ppm) ¹	7.5	13.8	150
COD (ppm)	187.0	218.2	350
TSS (ppm)	42.8	43.1	200
pH	7.4	7.6	6-9
AOX (ppm)	5.8	3.7	NA

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE		FLYASH		DRESS & GRIT	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Incinerate	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Compost (fertilizer) ¹	100%	100%	43%	48%	0%	0%
Sell	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Landfill (dry metric tons)	0%	0%	57%	52%	100%	100%
Other	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volume (Tons per Day)	33.82	40.36	106.66	62.20	118.95	137.47

Dan untuk pembuangan air, akan dikembalikan ke sumber dimana air didapatkan tetapi terlebih dahulu diproses dengan menggunakan metode fisika, kimia dan biologi agar air yang dibuang telah dipisahkan dari zat-zat kimia.

Untuk aspek produk dan jasa, seperti yang telah dijelaskan dalam *sustainability report* adalah bahwa produk-produk perusahaan seperti kertas, *tissue*, dan produk-produk kemasan lainnya dibuat dengan menggunakan bahan baku yang aman dan perusahaan patuh terhadap peraturan keamanan produk yang mengeluarkan daftar bahan baku yang dilarang. Tetapi dalam aspek ini tidak dijelaskan mengenai reklamasi produk yang terjual.

Untuk aspek kepatuhan dan aspek keseluruhan, tidak dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan.

Indikator kinerja masyarakat juga dibagi menjadi dua bagian besar yaitu indikator kinerja sosial dan indikator kinerja tanggung jawab produk. Untuk indikator kinerja sosial dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu aspek sosial (dampak terhadap sosial), aspek korupsi (risiko korupsi, pelatihan anti korupsi, dan tanggap korupsi), aspek kebijakan publik (kebijakan publik dan *lobbying* serta kontribusi politik), aspek perilaku anti persaingan (peradilan monopoli), dan aspek

kepatuhan (denda atas ketidakpatuhan pada hukum). Sedangkan untuk indikator kinerja tanggung jawab produk juga dibagi lagi menjadi aspek kesehatan dan keselamatan konsumen (penilaian keselamatan produk dan ketidakpatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan produk), aspek pencantuman label produk dan jasa (pencantuman label info produk, pencantuman label ketidakpatuhan, dan kepuasan konsumen), aspek komunikasi pemasaran (program komunikasi pemasaran dan ketidakpatuhan terhadap komunikasi pemasaran), dan aspek privasi konsumen (pelanggaran privasi konsumen dan pelanggaran terhadap perjanjian).

Untuk indikator kinerja masyarakat ini, yang dapat dilihat dari *sustainability report* perusahaan adalah bahwa dengan berdirinya perusahaan memberikan dampak terhadap sosial dalam hal pendidikan, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur. Selebihnya mengenai aspek yang lain dalam indikator kinerja ini tidak dijelaskan di dalam *sustainability report*.

Untuk indikator kinerja tanggung jawab produk, seperti yang dijelaskan dalam *sustainability report* khususnya untuk aspek kesehatan dan keselamatan konsumen bahwa perusahaan memperhatikan keselamatan produk karena perusahaan patuh terhadap peraturan yang berlaku yang mengatur bahan baku apa yang diperbolehkan untuk digunakan dalam produk. Untuk aspek yang lainnya seperti aspek pencantuman label produk, komunikasi pemasaran dan privasi konsumen tidak dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan.

Indikator kinerja praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak juga terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek tenaga kerja (total angkatan kerja, pergantian di kalangan karyawan, dan tunjangan karyawan), aspek tenaga kerja/hubungan manajemen (cakupan daya tawar kolektif dan jangka waktu peringatan), aspek keselamatan dan kesehatan kerja (komite K3, tingkat cedera dan kecelakaan, serangan penyakit serius, dan K3 *trade union*), aspek pelatihan dan pendidikan (rata-rata jam pelatihan, program manajemen keterampilan, dan kaji ulang resmi), dan aspek keragaman dan peluang yang setara (indikator keragaman dan perbandingan gaji antara pria/wanita).

Aspek yang dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan untuk indikator kinerja praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak ini adalah aspek tenaga kerja dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan aspek yang lainnya tidak dijelaskan. Untuk aspek tenaga kerja disebutkan jumlah atau total angkatan kerja yang dimiliki perusahaan yaitu:

**2005 NUMBER OF EMPLOYEES
AND INDIRECT JOBS**

MILL	EMPLOYEES	INDIRECT JOBS
Indah Klat Perawang	8,000	7,000
Indah Klat Serang	5,000	1,100
Indah Klat Tangerang	1,200	250
Lontar Papyrus	2,000	600
Pindo Deli (1&2)	7,150	2,500
Tjiwi Kimia	13,500	3,800
Total	36,850	15,250

Sedangkan untuk pergantian di kalangan karyawan dan tunjangan karyawan tidak dijelaskan dalam *sustainability report*. Selanjutnya, untuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan bahwa perusahaan mempunyai target dari tahun ke tahun untuk mengurangi tingkat cedera dan kecelakaan dalam kerja, dimana masing-masing pabrik mempunyai perhitungan mengenai *frequency index* dan *severity index* dari kecelakaan kerja yang terjadi, dimana disebutkan angka target dan angka aktualnya. Dimana perhitungan ini berasal dari *Guideline for Company Hygiene & Health Labor* by Dr. Suma'mur P.K., M.Sc., 1998. Perusahaan memiliki program proaktif yaitu *occupational health and safety management* (SMK3) yang menitikberatkan pada manajemen risiko dan kepatuhan terhadap SMK3. Selain itu perusahaan juga memiliki program *Japanese "5S"* yang didesain untuk mempromosikan peningkatan yang terus-menerus dalam organisasi tempat kerja dan juga pengendalian secara visual. Kemudian perusahaan juga mempunyai jadwal rutin untuk pengecekan kesehatan karyawan sehingga mengurangi terjadinya serangan penyakit serius dan juga pelatihan dan pemberian perlengkapan keselamatan untuk masing-masing karyawan.

Indikator kinerja hak asasi manusia terdiri dari aspek praktik investasi dan pengadaan (investasi yang sesuai HAM, penyaringan pemasok, dan waktu pelatihan HAM), aspek non-diskriminasi (insiden diskriminasi), dan aspek kebebasan berserikat dan daya tawar kolektif (risiko daya tawar kolektif), aspek tenaga kerja dibawah umur/anak-anak (risiko tenaga kerja dibawah umur), aspek kerja paksa (risiko kerja paksa), aspek praktik keamanan (pelatihan tentang

keamanan), dan aspek hak-hak warga pribumi (pelanggaran atas hak-hak warga pribumi).

Dalam indikator kinerja hak asasi manusia ini, aspek yang dijelaskan dalam *sustainability report* hanyalah aspek mengenai praktik investasi dan pengadaan, dimana perusahaan melakukan penyaringan terhadap pemasok seperti yang tercantum dalam kebijakan perusahaan mengenai pemasok. Untuk aspek-aspek yang lainnya tidak dijelaskan dalam *sustainability report* perusahaan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk komponen-komponen yang ada dalam bagian pendekatan manajemen dan indikator kinerja, perusahaan tidak mengungkapkan secara lengkap dan jelas dalam *sustainability report* perusahaan. Terdapat lima indikator kinerja dalam bagian ini yaitu ekonomi, lingkungan, masyarakat, tenaga kerja dan pekerjaan yang layak dan hak asasi manusia. Dan dari lima indikator kinerja yang ada, tidak satupun indikator kinerja yang diungkapkan secara penuh atau lengkap. Dengan begitu maka bobot yang diberikan adalah 1, karena pengungkapannya tidak lengkap.

Berikut adalah indeks *Sustainability Reporting Asia Pulp and Paper (APP)* tahun 2005-2006 yang mengacu pada indikator pokok Global Reporting Initiative (GRI).

No	Komponen Pelaporan	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
			IK	TK	PD	LP
1.	Strategi dan Analisis	1.1		3		
	Sepatah Kata CEO Dampak Utama, Risiko, Peluang	1.2		3		
2.	Profil Organisasi Nama Organisasi	2.1		Front Cover		

No	Komponen Pelaporan	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
			IK	TK	PD	LP
	Merk, Jasa Utama	2.2				
	Struktur Operasional	2.3		2, 4		
	Lokasi Kantor Pusat	2.4		73		
	Negara-negara Tempat Operasi	2.5		-		
	Bentuk Badan Hukum	2.6		4-5		
	Pasar yang dilayani	2.7		-		
	Skala Organisasi	2.8		4		
	Perubahan Signifikan	2.9	27, 33, 39	51	45	21
	Penghargaan yang diperoleh	2.10	27, 33, 39	51	45	21
			28-29	52,	46,	22,
			34-35	53	47	23
			40-41			
3.	Parameter Laporan					
	Profil Pelaporan					
	Periode Pelaporan	3.1		2		
	Laporan Sebelumnya	3.2		-		
	Siklus Pelaporan	3.3		2		
	Titik Kontak	3.4		-		
	Lingkup dan Batas Laporan					
	Menentukan Isi Laporan	3.5		2, 10, 11		
	Batas Laporan	3.6		2, 10, 11		
	Batas Lingkup Laporan	3.7		2, 10, 11		
	Dasar Pelaporan	3.8		2, 10, 11		
	Ukuran, Perhitungan	3.9		All (throughout the report)		
	Uraian	3.10		4		
	Perubahan dibanding Laporan Sebelumnya	3.11		-		
	Indeks Isi GRI					
	Tabel Penunjuk Lokasi Standar					
	Pengungkapan dalam Laporan	3.12		-		
	Jaminan					
	Praktek Jaminan	3.13		Appendix VI		
4.	Penyelenggaraan, Komitmen, dan Keterlibatan					
	Struktur, Komite	4.1		73		
	Pemisahan Chair/CEO	4.2		73		
	Anggota Independen	4.3		73		
	Mekanisme untuk Rekomendasi kepada Manajemen	4.4	-	-	-	-
	Hubungan antara Kompensasi dan Kinerja	4.5	-	-	-	-
	Konflik Kepentingan	4.6		7		
	Kualifikasi Dewan	4.7	-			
	Nilai Sosial Lingkungan Ekonomi	4.8		8, 12-16		
	Prosedur Pemantauan Kinerja	4.9		-		
	Proses Evaluasi Dewan Direksi	4.10		-		

No	Komponen Pelaporan	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
			IK	TK	PD	LP
	Komitmen pada Inisiatif dari Luar					
	Pendekatan Kesiagaan	4.11				
	Ketanguhan Prinsip	4.12		12-19		
	Keanggotaan	4.13		3		
				59		
	Keterlibatan Stakeholder					
	Stakeholder yang terlibat	4.14				
	Mengidentifikasi Stakeholder	4.15		10		
	Keterlibatan Stakeholder	4.16		77-78		
	Hasil Keterlibatan	4.17		10		
				10		
	Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja					
	Ekonomi : Pengungkapan tentang Pendekatan Manajemen / PTPM	EC				
	Indikator Kinerja Ekonomi					
	Aspek : Kinerja Ekonomi					
	Hasil Nilai Ekonomi	EC1		6, 13-16		
	Resiko Keuangan akibat Perubahan Iklim	EC2		-		
	Cakupan Program Tunjangan	EC3		-		
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	EC4		-		
	Aspek : Keberadaan Pasar					
	Rasio-rasio Upah Awal	EC5		-		
	Pemakaian Pemasok Lokal	EC6		57, 75		
	Pemakaian Tenaga Kerja Lokal	EC7		18		
	Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung					
	Dampak Investasi Lokal	EC8		13-16		
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC9		14		
	Lingkungan : PTPM	EN				
	Indikator Kinerja Lingkungan					
	Aspek : Bahan					
	Bahan yang Digunakan	EN1		18		
	Pemakaian Input Daur Ulang	EN2		65		
	Aspek : Energi					
	Energi Langsung yang digunakan	EN3		-		
	Energi Tidak Langsung yang digunakan	EN4		-		
	Penghematan Energi	EN5		-		
	Energi Produk yang Dihemat	EN6		-		
	Pengurangan Penggunaan Energi Tidak Langsung	EN7		-		

Komponen Pelaporan

	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
		IK	TK	PD	LP
Aspek : Air					
Pemakaian Air	EN8	28, 34, 40	52	46	22
Sumber Air yang Terpengaruh	EN9	28, 34, 40	52	46	22
Pemakaian Ulang Air	EN10				
Aspek : Keanekaragaman Hayati					
Lahan Keanekaragaman Hayati	EN11				
Dampak terhadap Keanekaragaman Hayati	EN12		59-61		
Pemulihan Habitat	EN13		59-61		
Strategi Keanekaragaman Hayati	EN14		59-61		
Spesies yang dilindungi	EN15		59-61, 67		
Aspek : Emisi, Pembuangan dan Limbah					
Gas Rumah Kaca Langsung	EN16				
Gas Rumah Kaca Tidak Langsung	EN17				
Pengurangan Gas Rumah Kaca	EN18				
Emisi Pengurangan Ozon	EN19	30, 36, 42	54	48	24
Nox, Sox, lain-lain	EN20	30, 36, 42	54	48	24
Pembuangan Air	EN21	30, 36, 42	54	48	24
Jumlah Limbah	EN22	30, 36, 42	54	48	24
Tumpahan yang Signifikan	EN23	30, 36, 42	54	48	24
Limbah Berbahaya	EN24	30, 36, 42	54	48	24
Dampak Pembuangan Air	EN25	30, 36, 42	54	48	24
Aspek : Produk dan Jasa					
Mengurangi Dampak Produk	EN26		18-19		
Reklamasi Produk Terjual	EN27				
Aspek : Kepatuhan					
Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Lingkungan	EN28				
Aspek : Keseluruhan					
Pengeluaran untuk Perlindungan Hukum	EN29				
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak : PTPM	LA				
Indikator Kinerja Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang layak					
Aspek : Tenaga Kerja					
Total Angkatan Kerja	LA1		18		
Pergantian di Kalangan Karyawan	LA2				
Tunjangan Karyawan	LA3				
Aspek : Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen					
Cakupan Daya Tawar Kolektif	LA4				
Jangka Waktu Peringatan	LA5				

No	Komponen Pelaporan	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
			IK	TK	PD	LP
	Aspek : Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	Komite K3	LA6	29, 35, 41	53	47	23
	Tingkat Cidera dan Kecelakaan	LA7	29, 35, 41	53	47	23
	Serangan Penyakit Serius	LA8	29, 35, 41	53	47	23
	K3 Trade Union	LA9	29, 35, 41	53	47	23
	Aspek : Pelatihan dan Pendidikan					
	Rata-rata Jam Pelatihan	LA10		-		
	Program Manajemen Keterampilan	LA11		-		
	Kaji Ulang Resmi	LA12		-		
	Aspek : Keragaman dan Peluang yang Setara					
	Indikator Keragaman	LA13		-		
	Perbandingan Gaji antara Pria/Wanita	LA14		-		
	Hak Asasi Manusia : PTPM	HR				
	Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia					
	Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan					
	Investasi yang sesuai Hak Asasi Manusia	HR1		-		
	Penyaringan Pemasok	HR2		75		
	Waktu Pelatihan Hak Asasi Manusia	HR3		-		
	Aspek : Non – Diskriminasi					
	Insiden Diskriminasi	HR4		-		
	Aspek : Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kolektif					
	Risiko Daya Tawar Kolektif	HR5		-		
	Aspek : Tenaga Kerja dibawah Umur/Anak-anak					
	Risiko Tenaga Kerja Dibawah Umur	HR6		-		
	Aspek : Kerja Paksa					
	Risiko Kerja Paksa	HR7		-		
	Aspek : Praktek Keamanan					
	Pelatihan Tentang Keamanan	HR8		-		
	Aspek : Hak-hak Warga Pribumi					
	Pelanggaran atas Hak-hak Warga Pribumi	HR9		-		
	Sosial : PTPM	SO				
	Indikator Kinerja Masyarakat					
	Aspek : Sosial					
	Dampak terhadap Sosial	SO1		12-16		

No	Komponen Pelaporan	GRI	Dilaporkan pada (halaman)			
			IK	TK	PD	LP
	Aspek : Korupsi					
	Risiko Korupsi	SO2				
	Pelatihan Anti Korupsi	SO3		-		
	Tanggap Korupsi	SO4		-		
	Aspek : Kebijakan Publik					
	Kebijakan Publik dan Lobbying	SO5				
	Kontribusi Politik	SO6		-		
	Aspek : Perilaku Anti Persaingan					
	Peradilan Monopoli	SO7		-		
	Aspek : Kepatuhan					
	Denda atas Ketidapatuhan pada Hukum	SO8		-		
	Tanggung Jawab Produk : PTPM	PR				
	Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk					
	Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Konsumen					
	Penilaian Keselamatan Produk	PR1			19	
	Ketidapatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Konsumen	PR2			19	
	Aspek : Pencantuman Label Produk dan Jasa					
	Pencantuman Label Info Produk	PR3			-	
	Pencantuman Label Ketidapatuhan	PR4			-	
	Kepuasan Konsumen	PR5			-	
	Aspek : Komunikasi Pemasaran					
	Program Komunikasi Pemasaran	PR6			-	
	Ketidapatuhan terhadap Komunikasi Pemasaran	PR7			-	
	Aspek : Privasi Konsumen					
	Pelanggaran Privasi Konsumen	PR8			-	
	Pelanggaran terhadap Perjanjian	PR9			-	

4.3 Analisis Kriteria Penilaian *Sustainability Reporting* Menurut Ikatan Akuntan

Indonesia Komite Akuntan Manajemen (IAI-KAM)

Kriteria yang dilakukan oleh IAI-KAM menitikberatkan pada hal-hal yang

menyangkut lingkungan, sosial dan/atau laporan berkelanjutan suatu perusahaan.

Kriteria tersebut dikelompokkan menjadi tiga elemen yaitu *completeness*, *credibility*,

and communication. Dibawah ini penulis mencoba untuk melakukan penilaian terhadap *sustainability report* perusahaan dengan menggunakan kriteria penilaian yang digunakan oleh IAI-KAM. Penulis menggunakan pembobotan antara 1(rendah) dan 3(tinggi). Dan pembobotan ini diberikan berdasarkan *judgement* dari penulis.

4.3.1 Completeness

No.	Indicator	Weighting
1.1	<i>Corporate context, e.g. major products and/or services, financial performance, geographical location, employment information.</i>	2
1.2	<i>Key (direct and indirect) economic/social/environmental impacts of business considered and explained.</i>	3
1.3	<i>Detail and clarity of social/environmental/SD policy and management commitment.</i>	3
1.4	<i>Rationale behind choice of any indicators used in report.</i>	2
1.5	<i>Inclusion of targets and objectives.</i>	3
1.6	<i>Product or service stewardship (e.g. design, LCA, disposal policies, social and/or economic impact of product).</i>	2
1.7	<i>Supplier procurement policies and issues.</i>	3
1.8	<i>Description of process (approaches to measurement, stakeholder consultation, reporting and accounting).</i>	3
1.9	<i>Scope of the report (by entity).</i>	3
1.10	<i>Reporting and accounting policies.</i>	2
1.11	<i>Report audience(s) identified.</i>	2
1.12	<i>Placing social/environmental/SD reporting in context of other reporting undertaken.</i>	
1.13	<i>Clear rationale for reporting.</i>	2
1.14	<i>A clear and credible articulation of the meaning of SD, consideration of what implications arise for the organization as it pursues SD, tensions which emerge and unresolved complexities.</i>	2

4.3.2 Credibility

No.	Indicator	Weighting
2.1	<i>Headline achievements in current period.</i>	3
2.2	<i>Named board member responsible for SD issues, and governance system explained.</i>	2
2.3	<i>Contact name and details for person in charge of report.</i>	1
2.4	<i>Management system and its integration into the business process.</i>	3
2.5	<i>Contingency planning and risk management.</i>	2
2.6	<i>Internal audit processes.</i>	2
2.7	<i>Compliance/non-compliance record with legislation.</i>	2
2.8	<i>Economics/social/environmental impact data (showing absolute, normalized, and comparative data with trends over time and within sector) with appropriate cross linkages between elements.</i>	2
2.9	<i>Accounting for social/environmental/SD data (especially regarding the impact of externalities).</i>	2
2.10	<i>Application of guidance and/or standards.</i>	1
2.11	<i>Description of stakeholder consultation/dialogue process.</i>	2
2.12	<i>Use of stakeholder feedback.</i>	2
2.13	<i>Third party statement.</i>	3

4.3.3 Communication

No.	Indicator	Weighting
3.1	<i>Layout and appearance.</i>	3
3.2	<i>Understandability, readability, and appropriate length.</i>	1
3.3	<i>Accessibility.</i>	3
3.4	<i>Communication and feedback mechanisms.</i>	1
3.5	<i>Innovative approaches.</i>	2
3.6	<i>Availability of a summary report and/or executive summary.</i>	3
3.7	<i>Comprehensive navigation through report.</i>	3
3.8	<i>Use of internet.</i>	2
3.9	<i>Reference to website and other reports, and how reports relate to each other.</i>	2
3.10	<i>Appropriateness of graphs, illustrations, and photos.</i>	3
3.11	<i>Integration with financial statements.</i>	3

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil penilaian untuk *sustainability report* perusahaan dari segi *completeness*, *credibility* dan *communication* adalah cukup baik, karena pada umumnya telah diungkapkan dalam laporan walaupun tidak secara lengkap.

Dan perlu ditekankan bahwa walaupun kriteria-kriteria yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang signifikan, tetapi sebenarnya tidak hanya isu-isu ini saja yang perlu dipertimbangkan. Kriteria ini hanya sebagai acuan atau diasumsikan telah mewakili keadaan laporan perusahaan yang baik. Dan pada akhirnya kriteria penilaian ini digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penjurian dan bukan merupakan suatu sistem penilaian yang baku.

Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan adalah tren pelaporan saat ini dan keadaan lingkungan/sosial/keberlanjutan, isu-isu spesifik lain yang terkait, pendekatan pelaporan yang inovatif dan pengungkapan pelaporan dimana patut mendapatkan penghargaan yang spesifik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang mengeluarkan *sustainability report* untuk pertama kalinya, laporan tersebut adalah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Untuk strategi dan analisis, perusahaan telah mengungkapkannya dalam *sustainability report*-nya sesuai dengan panduan GRI.
2. Untuk profil organisasi, yang tidak dijelaskan atau diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan adalah lokasi kantor pusat dan bentuk badan hukum dari perusahaan.
3. Untuk parameter laporan, yang tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan adalah laporan sebelumnya dan perubahan dibanding laporan sebelumnya, hal ini dikarenakan karena laporan ini adalah yang pertama kalinya diterbitkan oleh perusahaan. Selain itu tidak diungkapkannya titik kontak dan indeks isi GRI.

4. Untuk komponen-komponen dari penyelenggaraan, komitmen, dan keterlibatan sebagian besar telah diungkapkan oleh perusahaan dalam laporannya sesuai dengan panduan GRI 2006 versi 3.0, yang belum diungkapkan hanya mekanisme untuk rekomendasi kepada manajemen, kualifikasi dewan, prosedur pemantauan kinerja dan proses evaluasi dewan direksi.
5. Terakhir, komponen dari pendekatan manajemen dan indikator kinerja yang terbagi menjadi indikator kinerja ekonomi, lingkungan, masyarakat, praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak dan hak asasi manusia.
 - Dari indikator kinerja ekonomi terdapat tiga aspek yaitu aspek kinerja ekonomi, aspek keberadaan pasar dan aspek dampak ekonomi tidak langsung. Untuk aspek kinerja ekonomi yang tidak diungkapkan adalah risiko keuangan akibat perubahan iklim, cakupan program tunjangan dan bantuan keuangan dari pemerintah. Untuk aspek keberadaan pasar yang tidak diungkapkan hanya rasio-rasio upah awal. Yang terakhir untuk aspek dampak ekonomi telah diungkapkan dengan lengkap.
 - Dari indikator lingkungan terdiri dari aspek-aspek antara lain aspek bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, pembuangan dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan dan aspek keseluruhan. Dari aspek-aspek tersebut rata-rata yang telah diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan adalah untuk aspek bahan, air, keanekaragaman hayati, emisi, pembuangan dan limbah, dan produk dan jasa. Dan aspek yang tidak diungkapkan adalah energi, kepatuhan dan aspek keseluruhan.

- Untuk indikator kinerja masyarakat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu indikator kinerja sosial dan indikator tanggung jawab produk. Untuk indikator kinerja sosial yang diungkapkan perusahaan hanyalah untuk aspek sosial saja. Sedangkan aspek yang lainnya seperti aspek korupsi, kebijakan publik, perilaku anti persaingan dan kepatuhan tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan. Dan untuk indikator tanggung jawab produk yang diungkapkan dalam laporan adalah aspek kesehatan dan keselamatan konsumen, sementara aspek lainnya seperti aspek pencantuman label produk dan jasa, komunikasi pemasaran dan privasi konsumen tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan.
- Untuk indikator kinerja praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, yang telah diungkapkan oleh perusahaan adalah untuk aspek tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja, meskipun untuk aspek tenaga kerja yang diungkapkan hanya total angkatan kerja saja sementara pergantian di kalangan karyawan dan tunjangan karyawan tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan. Sedangkan aspek lainnya yaitu aspek tenaga kerja/hubungan manajemen, pelatihan dan pendidikan dan keragaman dan peluang yang setara tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan.

- Terakhir, untuk indikator hak asasi manusia yang disajikan dalam laporan perusahaan hanya penyaringan pemasok dimana penyaringan pemasok ini termasuk dalam aspek praktik investasi dan pengadaan. Sementara aspek lainnya antara lain aspek non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan daya tawar kolektif, tenaga kerja di bawah umur/anak-anak, kerja paksa, praktik keamanan dan hak-hak warga pribumi tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan.

5.2 Saran

Untuk pembuatan *sustainability report* selanjutnya diharapkan perusahaan dapat melengkapi komponen-komponen yang tidak diungkapkan dalam *sustainability report* tahun 2005-2006. Komponen-komponen yang tidak diungkapkan adalah sebagai berikut :

- Profil Organisasi : lokasi kantor pusat dan bentuk badan hukum perusahaan.
- Parameter Laporan : laporan sebelumnya, titik kontak, perubahan dibanding laporan sebelumnya dan pengungkapan dalam laporan perusahaan.
- Penyelenggaraan, Komitmen dan Keterlibatan : mekanisme untuk rekomendasi kepada manajemen, hubungan antara kompensasi dan kinerja, kualifikasi dewan, prosedur pemantauan kinerja dan proses evaluasi dewan direksi
- Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja
 1. Ekonomi : risiko keuangan akibat perubahan iklim, cakupan program tunjangan, bantuan keuangan dari pemerintah, dan rasio-rasio upah awal.
 2. Lingkungan : semua komponen dalam aspek energi, pemakaian ulang air, gas rumah kaca baik langsung maupun tidak langsung, pengurangan gas rumah kaca,

reklamasi produk terjual, pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan dan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan.

3. Masyarakat : semua komponen yang ada dalam indikator ini tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan kecuali yang aspek sosial dan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen.

4. Praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak : semua komponen dalam aspek tenaga kerja/hubungan manajemen, aspek pelatihan dan pendidikan, dan aspek keragaman dan peluang yang setara.

5. Hak Asasi Manusia : semua komponen dalam indikator ini tidak diungkapkan dalam *sustainability report* perusahaan, kecuali penyaringan pemasok.

Dan juga diharapkan untuk selanjutnya perusahaan dapat mencantumkan indeks GRI yang merupakan tabel penunjuk lokasi standar atas pengungkapan dalam laporan, sehingga dapat memudahkan bagi para *stakeholder* dalam membaca *sustainability report* perusahaan tersebut.

Begitu juga dengan pengungkapan dalam pelaporan diharapkan perusahaan dapat mengacu pada GRI 2006 versi 3.0 atau yang biasa disebut dengan G3.

DAFTAR PUSTAKA

- Alois A. Nugroho. 2001. *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aneka Tambang. 2007. *Sustainable Report 2006*. Jakarta : Aneka Tambang.
- Anggraini, Nenny. 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Buletin Ekonomi, September 2007 Vol. XI No. 2.
- Ardana I. Komang. 2008. *Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Buletin Studi Ekonomi Volume 13 Nomor 1.
- Asia Pulp and Paper. 2007. *APP Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia 2005-2006*. Jakarta : Asia Pulp and Paper.
- Azhari, Siti Kusumawati. 2007. *Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jurnal Socioteknologi Edisi 12 Tahun 6.
- Ballou, Heitger, dan Landes. (2006). *The Future of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly Growing Assurance Opportunity*. Journal of Accountancy.
- Bowen, Howard. 1950. *Social Responsibility of The Business Man*.
- Burdge J. Rabel. 1994. "Social Impact, Assessment and Management a Participative Approach". Longman-Cheshire Publisher, Ltd.
- Carrol, Archie B. 1999. *CSR, Evolution of a Devinitonal Construct*. Business and Society, vol 38/3
- , 1998. *The Four Faces of Corporate Citizenship*. Business and Society Review, September, vol. 100, no. 1, pp. 1-7
- and Buchholtz, A. (2003) *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*. Thomson. Ohio
- Daniri, Mas Ahmad. 2006. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia
- Darwin, Ali. (2006). *Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan, dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia*. EBAR Edisi III/September-Desember.

- Elkington, J. 1998. *Cannibal with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business*.
- Freemont E. Kast, James E. Rosenzweig. 1995. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartanti, Dwi. (2006). *Makna Corporate Social Responsibility: Sejarah dan Perkembangannya*. EBAR Edisi III/September-Desember.
- Al-KAM. 2005. *Kriteria Penilaian Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2006*.
- Andah Kiat. 2007. *Annual Report 2006*.
- Kaltim Prima Coal. 2007. *Sustainable Development Report 2006*. Sangatta : Kaltim Prima Coal.
- Wolfe, Ans. (2003). *Trends in Sustainability Reporting by the Fortune Global 250*. John Wiley and Sons.
- Porter, P. dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Cause*. John Wiley & Sons Inc.
- Lawrence, Weber, dan Post. (2008). *Business and Society: Shareholders, Ethics, Public Policy*. McGraw-Hill Companies.
- Antar Papyrus. 2007. *Annual Report 2006*.
- Surajalah SWA Sembada. No. 26. XXI, Edisi 19 Desember 2005-11 Januari 2006.
- Widhiastika, Sophia. M. (2004). *Corporate Social Responsibility among Foreign Multinational Companies in Indonesia*. Professional Research Paper Presented to the Faculty of The Center for International Studies, Ohio University.
- Porter, Michael E. dan Mark R. Kramer. 2006. *Strategi & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*. Harvard Business Review.
- Chandler W. Griffin & Michael W. Pustay. 2005. *International Business*. New Jersey: Upper Sadle River.
- Widhiastika. 2005. *Pedoman GRI*. Media Akuntansi Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005.
- Widhiastika, Chairil N. 2007. *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosioteknologi Ed. 12 Tahun 6.

- Sukada, Sonny, dkk. 2007. *Membumikan bisnis berkelanjutan : memahami konsep dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan*. Jakarta : Yayasan Indonesia Business Link.
- Susanto, A. B. (2007). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- The Global Reporting Initiatives. *GRI Guidelines*, 2006.
- Tjiwi Kimia. 2007. *Annual Report 2006*.
- Pindo Deli. 2007. *Annual Report 2006*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.
- Untung, Hendrik Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Witoelar, Rachmat. 2005. *Sustainability Reporting: Paradigma Baru Pelaporan Perusahaan*. Media Akuntansi Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005.
- Yakin, Addinul. 1997. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presindo.

Lampiran 1

Global Reporting Initiatives G3 Version (GRI G3)

Komponen-komponen yang ada di dalam pedoman GRI tahun 2006 Versi 3.0. terdiri dari:

1. Strategy and Analysis

1.1 Statement from the most senior decision maker of the organization (e.g., CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization and its strategy.

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities.

2. Organizational Profile

2.1 Name of the organization.

2.2 Primary brands, products, and/or services.

2.3 Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures.

2.4 Location of organization's headquarters.

2.5 Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.

2.6 Nature of ownership and legal form.

2.7 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/beneficiaries).

2.8 Scale of the reporting organization, including number of employees; Net sales (for private sector organizations) or net revenues (for public sector organizations); Total capitalization broken down in terms of debt and equity (for private sector organizations); and Quantity of products or services provided.

2.9 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership including the location of, or changes in operations, including facility openings, closings, and expansions; and changes in the share capital structure and

other capital formation, maintenance, and alteration operations (for private sector organizations).

2.10 Awards received in the reporting period.

3. Report Parameters

Report Profile

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.

3.2 Date of most recent previous report (if any).

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents.

Report Scope and Boundary

3.5 Process for defining report content, including Determining materiality; Prioritizing topics within the report; and Identifying stakeholders the organization expects to use the report.

3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers).

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or between organizations.

3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and techniques underlying estimations applied to the compilation of the Indicators and other information in the report.

3.10 Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and the reasons for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, change of base years/periods, nature of business, measurement methods).

3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in the report.

GRI Content Index

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

Assurance

3.13 Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

4. Governance, Commitments, and Engagement

Governance

- 4.1 Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.*
- 4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.*
- 4.3 For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest governance body that are independent and/or non-executive members.*
- 4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body.*
- 4.5 Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives (including departure arrangements), and the organization's performance (including social and environmental performance).*
- 4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.*
- 4.7 Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest governance body for guiding the organization's strategy on economic, environmental, and social topics.*
- 4.8 Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic, environmental, and social performance and the status of their implementation.*
- 4.9 Procedures of the highest governance body for overseeing the organization's identification and management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or compliance with internationally agreed standards, codes of conduct, and principles.*
- 4.10 Processes for evaluating the highest governance body's own performance, particularly with respect to economic, environmental, and social performance.*

Commitments to External Initiatives

- 4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.***
- 4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or endorses.***
- 4.13 Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy organizations in which the organization has positions in governance bodies; Participates in projects or committees; Provides substantive funding beyond routine membership dues; or Views membership as strategic.***

Stakeholder Engagement

- 4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization.***
- 4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.***
- 4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.***
- 4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.***

5. Management Approach and Performance Indicators

ECONOMIC

Economic Performance Indicators

Aspect: Economic Performance

EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.

EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.

EC3 Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.

EC4 Significant financial assistance received from government.

Aspect: Market Presence

EC5 Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation.

EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.

EC7 Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at locations of significant operation.

Aspect: Indirect Economic Impacts

EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.

EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

ENVIRONMENTAL

Environmental Performance Indicators

Aspect: Materials

EN1 Materials used by weight or volume.

EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials.

Aspect: Energy

EN3 Direct energy consumption by primary energy source.

EN4 Indirect energy consumption by primary source.

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements.

EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives.

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

Aspect: Water

EN8 Total water withdrawal by source.

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water.

EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused.

Aspect: Biodiversity

EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

EN13 Habitats protected or restored.

EN14 Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

EN15 Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.

Aspect: Emissions, Effluents, and Waste

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.

EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight.

EN20 NO, SO, and other significant air emissions by type and weight.

EN21 Total water discharge by quality and destination.

EN22 Total weight of waste by type and disposal method.

EN23 Total number and volume of significant spills.

EN24 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.

EN25 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization's discharges of water and runoff.

Aspect: Products and Services

EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.

EN27 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.

Aspect : Compliance

EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations.

Aspect : Transport

EN29 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's operations, and transporting members of the workforce.

Aspect : Overall

EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type.

SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS

Labor Practices and Decent Work Performance Indicators

Aspect: Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region.

LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region.

LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.

Aspect: Labor/Management Relations

LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.

LA5 Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements.

Aspect: Occupational Health and Safety

LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of workrelated fatalities by region.

LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.

LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

Aspect: Training and Education

LA10 Average hours of training per year per employee by employee category.

LA11 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.

LA12 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews.

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.

LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee category.

Human Rights

Human Rights Performance Indicators

Aspect: Investment and Procurement Practices

HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening.

HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken.

HR3 Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.

Aspect: Non-discrimination

HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken.

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.

Aspect: Child Labor

HR6 Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor.

Aspect: Forced and Compulsory Labor

HR7 Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.

Aspect: Security Practices

HR8 Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.

Aspect: Indigenous Rights

HR9 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.

SOCIETY

Society Performance Indicators

Aspect: Community

SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.

Aspect: Corruption

SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.

SO3 Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures.

SO4 Actions taken in response to incidents of corruption.

Aspect : Public Policy

SO5 Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.

SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.

Aspect: Anti-Competitive Behavior

SO7 Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

Aspect: Compliance

SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.

PRODUCT RESPONSIBILITY

Product Responsibility Performance Indicators

Aspect: Customer Health and Safety

PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures.

PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

Aspect : Product and Service Labeling

PR3 Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements.

PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.

PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.

Aspect : Marketing Communications

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.

PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.

Aspect : Customer Privacy

PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.

Aspect: Compliance

PR9 Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.

Lampiran 2

Kriteria Penilaian *Sustainability Reporting* Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kopartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM)

4.3.1 Completeness

No.	Indicator	Weighting
1.1	<i>Corporate context, e.g. major products and/or services, financial performance, geographical location, employment information.</i>	
1.2	<i>Key (direct and indirect) economic/social/environmental impacts of business considered and explained.</i>	
1.3	<i>Detail and clarity of social/environmental/SD policy and management commitment.</i>	
1.4	<i>Rationale behind choice of any indicators used in report.</i>	
1.5	<i>Inclusion of targets and objectives.</i>	
1.6	<i>Product or service stewardship (e.g. design, LCA, disposal policies, social and/or economic impact of product).</i>	
1.7	<i>Supplier procurement policies and issues.</i>	
1.8	<i>Description of process (approaches to measurement, stakeholder consultation, reporting and accounting).</i>	
1.9	<i>Scope of the report (by entity).</i>	
1.10	<i>Reporting and accounting policies.</i>	
1.11	<i>Report audience(s) identified.</i>	
1.12	<i>Placing social/environmental/SD reporting in context of other reporting undertaken.</i>	
1.13	<i>Clear rationale for reporting.</i>	
1.14	<i>A clear and credible articulation of the meaning of SD, consideration of what implications arise for the organization as it pursues SD, tensions which emerge and unresolved complexities.</i>	

4.3.2 Credibility

No.	Indicator	Weighting
2.1	<i>Headline achievements in current period.</i>	
2.2	<i>Named board member responsible for SD issues, and governance system explained.</i>	
2.3	<i>Contact name and details for person in charge of report.</i>	
2.4	<i>Management system and its integration into the business process.</i>	
2.5	<i>Contingency planning and risk management.</i>	
2.6	<i>Internal audit processes.</i>	
2.7	<i>Compliance/non-compliance record with legislation.</i>	
2.8	<i>Economics/social/environmental impact data (showing absolute, normalized, and comparative data with trends over time and within sector) with appropriate cross linkages between elements.</i>	
2.9	<i>Accounting for social/environmental/SD data (especially regarding the impact of externalities).</i>	
2.10	<i>Application of guidance and/or standards.</i>	
2.11	<i>Description of stakeholder consultation/dialogue process.</i>	
2.12	<i>Use of stakeholder feedback.</i>	
2.13	<i>Third party statement.</i>	

4.3.3 Communication

No.	Indicator	Weighting
3.1	<i>Layout and appearance.</i>	
3.2	<i>Understandability, readability, and appropriate length.</i>	
3.3	<i>Accessibility.</i>	
3.4	<i>Communication and feedback mechanisms.</i>	
3.5	<i>Innovative approaches.</i>	
3.6	<i>Availability of a summary report and/or executive summary.</i>	
3.7	<i>Comprehensive navigation through report.</i>	
3.8	<i>Use of internet.</i>	
3.9	<i>Reference to website and other reports, and how reports relate to each other.</i>	
3.10	<i>Appropriateness of graphs, illustrations, and photos.</i>	
3.11	<i>Integration with financial statements.</i>	

Lampiran 3

Karyawan, Dewan Direksi dan Komisaris

1. PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris	: Yudi Setiawan Lin
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris	: Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Show Chung Ho
Komisaris	: Kuo Cheng Shyong
Komisaris	: Lo Shang Shung
Komisaris Independen	: Mas Achmad Daniri
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	: Drs. Kamardy Arief
Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman

Direksi

Presiden Direktur	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Suresh Kilam
Wakil Presiden Direktur	: Lin Shun Keng

Wakil Presiden Direktur : Chen Wang Chi
Direktur : Didi Harsa
Direktur : Raymond Liu, Ph.D
Direktur : Ir. Buyung Wahab, MM
Direktur : Baharudin
Direktur/ Sekretaris Perusahaan : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 61 dari Linda Herawati, S.H., tanggal 21 September 2006 dan Akta Notaris No. 24 dari Linda Herawati, S.H., tanggal 12 Agustus 2005, susunan Komisaris, Komisaris Independen dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris : Drs. John Ferdinand Pandelaki
Komisaris : Arthur Tahya
Komisaris : Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Let. Jen. TNI (Pur) Soetodjo

Direksi

Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin
Direktur : Hendra Jaya Kosasih

Direktur	: Lu Ho-Chang
Direktur	: Suresh Kilam
Direktur	: Raymond Liu, Ph.D
Direktur	: Ir. Buyung Wahab M.M.
Direktur/ Sekretaris Perusahaan	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja

Jumlah rata-rata karyawan tetap Perusahaan tahun 2006 adalah 13.114 orang.

3. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan Komisaris, Komisaris Independen, dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Komisaris Utama	: John Ferdinand Pandelaki
Komisaris	: Sukirta Mangkudjaja
Komisaris Independen	: Letjen. TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA

Direksi

Direktur Utama	: Lin Fu Li
Wakil Direktur Utama	: Hendra Jaya Kosasih
Direktur	: -
Direktur	: Suresh Kilam

Direktur : Lin Shun Keng
Direktur : Ir. Buyung Wahab, MM
Direktur : Arthur Tahya

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 2.142 orang.

4. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Company

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 22 Agustus 2006, No. 61, dibuat dihadapan Edy Purnomo S.H. notaris pengganti Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, susunan komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya
Komisaris : Yudi Setiawan Lin
Komisaris : Arthur Tahya
Komisaris : Drs. John F. Pandelaki
Komisaris Independen : Letjen. TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen : Hajjah Ryani Soedirman
Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA

Direksi

Direktur Utama : Tsai HuanChi
Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Wakil Direktur Utama : Suresh Kilam

Direktur : Suhendra Wiriadinata

Direktur : Huang Hua Ching

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 9.326 orang.

